

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19**

**DI DESA BUNTU BUDA KABUPATEN MAMASA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

**Universitas BOSOWA Makassar**

**Oleh :**

**Indra Gunawan Tama'Buku**

**NIM :4517021007**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Indra Gunawan Tama'Buku  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Bosowa  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
COVID-19 DI DESA BUNTU BUDA KABUPATEN  
MAMASA**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 24 Agustus 2021

Penulis,



Indra Gunawan Tama'Buku

HALAMAN PENGESAHAN

Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda  
Kabupaten Mamasa

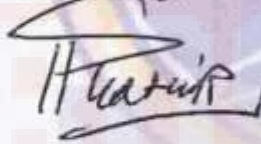
Indra Gunawan Tama' Buku

NIM: 4517021007

Makassar, 24 Agustus 2021

menyetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. Natsir Tompo, M.Si  
NIDN. 0901065901

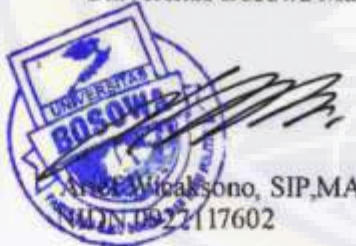
Pembimbing II



Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si  
NIDN. 0907076701

Mengetahui :

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar

  
Prof. Wipaksono, SIP, MA  
NIDN. 0922117602

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si  
NIDN. 0915098603

## **PALAMAN PENERIMAAN**

Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu,  
Dengan Judul Skripsi "**Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di  
Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa**"

Nama Mahasiswa : Indra Gunawan Tarna' Buku

Nomor Stambuk : 4517021007

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana  
(S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Bosowa Makassar,

## **PANITIA UJIAN**

Ketua



**Heri M. Wicaksono, SIP, MA**  
NIDN.0927117602

Sekretaris

**Nining Hastinda Zainal, S.Sos, M.Si**  
NIDN.0915098603

## **TIM PENGUJI**

1. Drs. Natsir Tompo, M.Si

2. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si

3. Dr. Uddin B. Sore, S.H., S.IP., M.Si

4. Dr. Dra. Nukaedah M.M

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya dengan judul "Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa". Dalam penyelesaian Program sarjana S1 ini,

Dengan selesainya proposal penelitian ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari Ketua Pembimbing dan Anggota Pembimbing serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, tak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Yayasan Aksa Mahmud, bapak Aksa Mahmud yang telah menyediakan fasilitas untuk digunakan selama menjadi mahasiswa pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas ISIPOL Universitas BOSOWA.

1. Rektor Universitas BOSOWA Makassar Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu., M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Teknik Kimia pada Fakultas Teknik Universitas BOSOWA.
2. Dekan Fakultas ISIPOL Universitas BOSOWA Makassar Arief Wicaksono, SIP, MA yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk belajar sungguh-sungguh sehingga pada akhirnya upaya belajar pada program strata satu ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ketua Program Studi Administrasi Negara Nining Haslinda Zainal, S.SOS ,M.Si yang telah banyak melayani dan mengarahkan penulis.
4. Dosen Pembimbing Akademik I Drs Natsir Tompo M.Si dan Dosen Pembimbing Akademik II Dr Juharni M.Si yang telah banyak membantu penulis dan, berdiskusi dengan penulis hingga menyelesaikan studi pada Program Administrasi Negara, Fakultas ISOPOL Universitas BOSOWA Makassar.
5. Penulis sangat berterimakasih kepada Orang tua penulis serta seluruh keluarga karena banyak mendorong, memotivasi, membiayai serta memfasilitasi penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas BOSOWA.
6. Seluruh dosen yang telah memberi dan mengajarkan ilmu yang berguna bagi penulis yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, teman-teman kelas Administrasi Negara angkatan 2017
7. Teman-teman dekat penulis Ahmad Syafar Saleh, Moch Nur Sadli, Ibnu Omar Batistuta, Bahtiar Rumengan, Yontri Hisage, Xaviernus, Alfaber Bowaslo.

Makassar, 24 Agustus 2021

Indra Gunawan Tama' Buku

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Implementasi.....	6
a. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi .....	7
b. Model-model Teori Implementasi Kebijakan .....	10
B. Pengertian Kebijakan .....	19
1. Jenis Kebijakan .....	21
2. Tingkatan Kebijakan .....	22
3. Proses Formulasi Kebijakan.....	24
4. Kesalahan Umum dalam Pembuatan Kebijakan .....	26
5. Ciri pokok Masalah Kebijakan .....	32

6. Dampak Kebijakan.....	32
C. Pengertian COVID-19.....	33
1. Gejala COVID-19 .....	34
2. Cara Penularan COVID-19 .....	35
3. Cara Penanggulangan COVID-19.....	36
D. Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.....	36
a. Pelaksanaan Kebijakan penanggulangan COVID-19 di desa Buntu-Buda	37
b. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.....	40
E. Penelitian Terdahulu .....	43
E. Kerangka Konseptual .....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Sumber Data.....	48
D. Informan.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Teknik Keabsahan Data .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

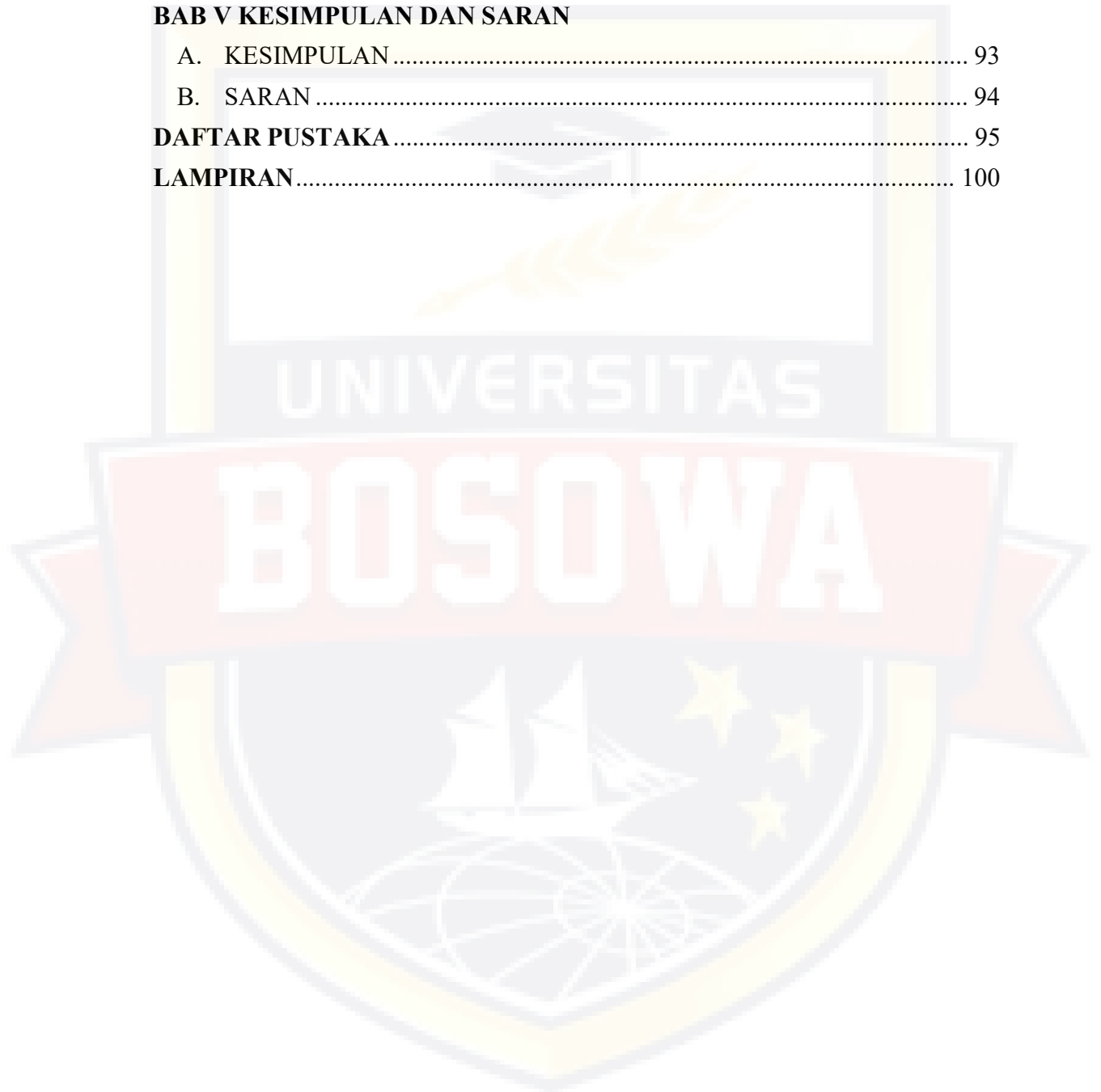
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	54
a. Gambaran Umum .....	54
b. Sejarah singkat Desa Buntu Buda .....	55
c. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa ...	57
B. HASIL PENELITIAN.....	58
a. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda	58
b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda .....	72
C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	84
a. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa. ....	84



b. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda .....	87
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN .....	93
B. SARAN .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
<b>LAMPIRAN</b> .....	100

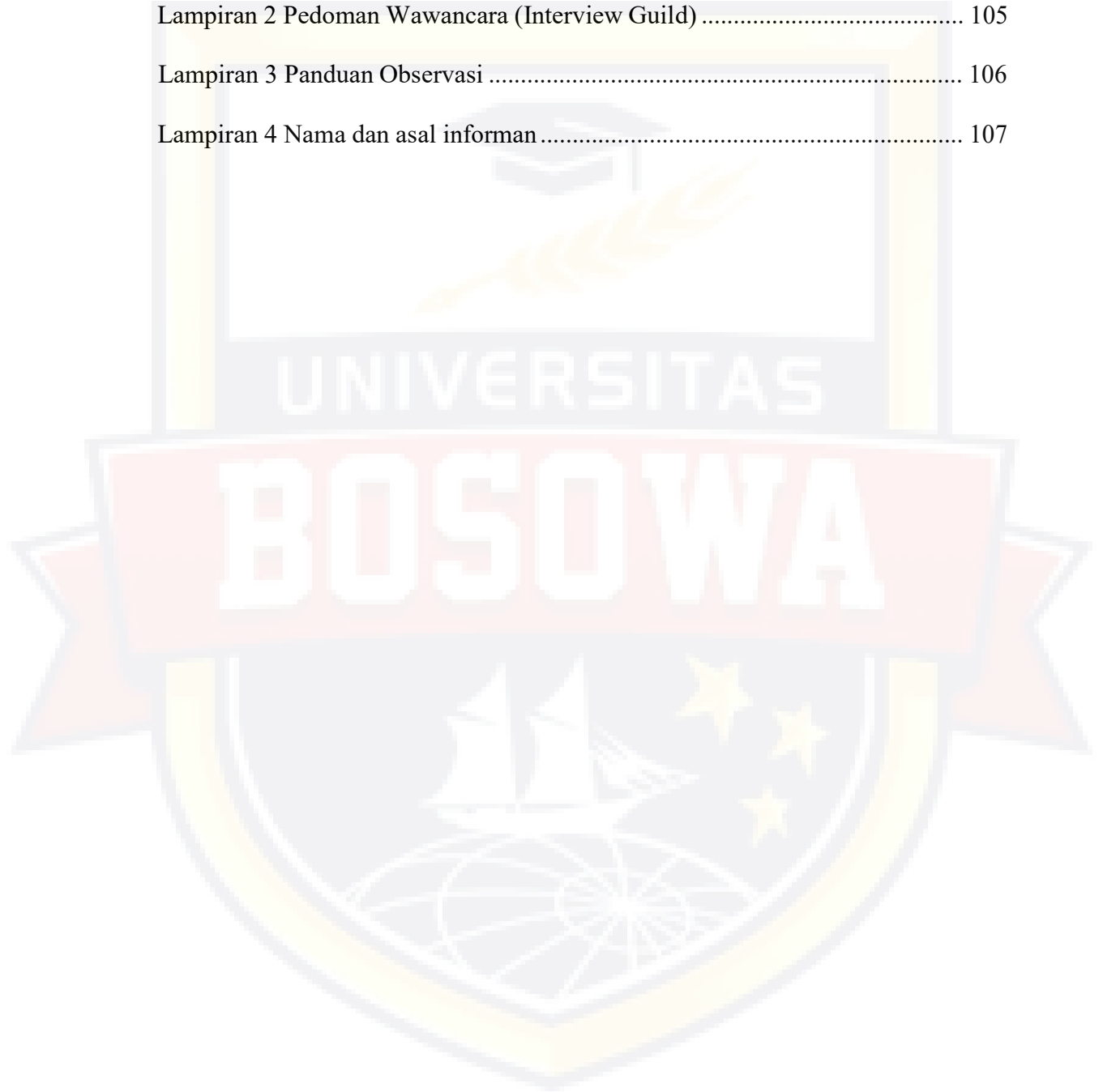


## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1</b> Pengaruh Komunikasi, Sumber daya, Struktur, Disposisi terhadap Implementasi.....	12
<b>Gambar 1. 2</b> Analisis kebijakan (William Dunn (1994)).....	15
<b>Gambar 1. 3</b> Letak Geografis Kabupaten Mamasa.....	56
<b>Gambar 1. 4</b> Kantor Desa Buntu Buda .....	110
<b>Gambar 1. 5</b> Rapat program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda .....	112
<b>Gambar 1. 6</b> Program sosialisasi keliling COVID-19 di Desa Buntu Buda.....	111
<b>Gambar 1. 7</b> Penempatan Sarana pencucian tangan di lapangan 9. ....	111
<b>Gambar 1. 8</b> Sarana pencucian tangan yang ditempatkan di rumah ibadah .....	112
<b>Gambar 1. 9</b> Sarana pencucian tangan yang ditempatkan di pasa.....	112
<b>Gambar 1. 10</b> Penyemprotan disinfektan .....	113
<b>Gambar 1. 11</b> Kepala Desa Buntu Buda.....	114
<b>Gambar 1. 12</b> Wawancara dengan Dokter Puskesmas Mamasa.....	114
<b>Gambar 1. 13</b> Wawancara dengan masyarakat di Dusun Randanan. ....	115
<b>Gambar 1. 14</b> Wawancara dengan masyarakat di Dusun Kampung Baru a.....	115
<b>Gambar 1. 15</b> Surat pernyataan pelaksanaan penelitian .....	118

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrix pengembangan instrumen penelitian .....	101
Lampiran 2 Pedoman Wawancara (Interview Guild) .....	105
Lampiran 3 Panduan Observasi .....	106
Lampiran 4 Nama dan asal informan .....	107



## DAFTAR TABEL

Table 1 :Penelitian .....	43
Table 2 : Matrix Untuk Pengembangan Penelitian .....	103
Table 3 : informan.....	107



## DAFTAR SINGKATAN

APD	Alat Pelindung Diri BBM
BBM	Bahan Bakar Minyak
BLT	Bantuan Langsung Tunai
CDC	Centers for Disease Control
COVID-19	Coronavirus Disease of 2019
MENKES	Menteri Kesehatan
PERMENKES	Peraturan Meteri Kesehetan
PERDA	Peraturan Daerah
PROKES	Protokol Kesehatan
SATGAS	Satuan Tugas
SEMBAKO	Sembilan Bahan Pokok
SDM	Sumber daya manusia
UUD	Undang-Undang Dasar
WHO	World Health Organizati

## ABSTRAK

Nama : Indra Gunawan Tama'Buku

Program Studi : Administrasi Negara

Judul ; Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntubuda Kabupaten Mamasa

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam kajian ilmu administrasi negara. Implementasi kebijakan adalah sebuah proses pelaksanaan sebuah kebijakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

Maka dalam skripsi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 ini berisi dan mengarah pada penanggulangan wabah COVID-19 terkhusus di Desa Buntubuda. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan analisis data secara kualitatif dengan mengembangkan teori Kebijakan Weimer Dan Vining (1999:396) dan teori Implementasi Kebijakan Goerge C Edward III Edward III dalam Subarsono (2010).

Dengan teknik pemilihan informan yaitu teknik Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dilaksanakan dengan sejumlah pelaksanaan kegiatan yaitu Sosialisasi keliling, Pembelakuan 3M, Pengadaan Sarana Pencucian tangan didalam desa dan dalam proses penyelenggaraan kegiatan terdapat faktor pendukung seperti penyediaan sarana 3M dan penghambat seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam desa.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan COVID-19.

## ABSTRACT

Name : Indra Gunawan Tama'Buku

Study Program : Public Administration

Title ; Implementation of the COVID-19 Response Policy in Buntubuda Village, Mamasa Regency

The purpose of this study was to determine the implementation of the COVID-19 response policy in Buntubuda Village, Mamasa District, Mamasa Regency in the study of state administration. Policy implementation is a process of implementing a policy to solve a problem. So in this thesis, the Implementation of the COVID-19 Response Policy contains and leads to the prevention of the COVID-19 outbreak, especially in Buntubuda Village.

The type of research used is a qualitative descriptive approach and uses qualitative data analysis by developing the theory of Policy Weimer Dan Vining (1999:396) and the theory of Policy Implementation George C Edward III Edward III in Subarsono (2010). The informant selection technique is the Random Sampling technique. Data collection techniques used include interviews, observation, and documentation.

The results of the study then concluded that the Implementation of the COVID-19 Response Policy in Buntubuda Village, Mamasa District, Mamasa Regency was carried out with mobile socialization steps, 3M enforcement, Procurement of hand washing facilities in the village and in the process of organizing activities there were supporting factors such as the provision of 3M facilities and obstacles. such as the low awareness of the community to comply with health protocols in the village.

Keywords: Policy Implementation, Countermeasures COVID-19 Response

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan adalah hak asasi manusia, dan juga merupakan investasi dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan pembangunan sehat secara menyeluruh dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan seluruh rakyat untuk hidup sehat dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi.

Kesehatan merupakan salah satu parameter yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tetapi kesehatan manusia tidak dapat hidup secara efektif. Undang-Undang Nomor 36 Tahun (2009) yang menjadi dasar hukum pengaturan kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, rohani, rohani, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomi.

Pada tanggal 2 Maret 2020, sejak Desember 2019, Wuhan (China) pertama kali mewabah penyakit manusia yang ganas dan aneh yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona ditemukan sekitar tahun 1960 dan menginfeksi rongga hidung. Kerusakan gigi hewan. COVID-19 muncul pertama kali di Kota Wuhan pada Desember 2019, meskipun pejabat kesehatan masih melacak sumber sebenarnya dari virus corona. Awalnya diduga virus corona terkait dengan konsumsi di pasar seafood Wuhan, kemudian pada 25 Januari 2020, WHO (World Health Organization) melaporkan bahwa individu tersebut terinfeksi COVID-19 untuk pertama kalinya.



Organisasi kesehatan lain seperti Centers for Disease Control (CDC), WHO, memantau informasi tentang penyebaran virus corona di seluruh dunia WHO mengumumkan pada 30 Januari 2020 bahwa wabah COVID-19 adalah darurat kesehatan masyarakat . Akibat masuknya virus ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan sejumlah kebijakan untuk mengatur pembatasan jarak aktivitas masyarakat dan menutup layanan transportasi bandara ke Wuhan (China). Virus COVID-19 telah berhasil dideteksi pada manusia di seluruh negara bagian China dan 24 negara lainnya termasuk Amerika Serikat. Menurut informasi terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus corona atau COVID-19 menyebar melalui kontak langsung dan cairan atau lendir, seperti pasien bersin dan batuk, kemudian menyebarkan virus ke tubuh melalui sistem pernapasan. Penularan juga terjadi ketika kita menyentuh suatu benda dengan tangan kita, kemudian menyentuh wajah (seperti hidung, mata, dan mulut), sehingga menyentuh cairan yang dikeluarkan penderita pada benda tersebut.

Menyikapi situasi di atas, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia merumuskan peraturan Menteri Kesehatan (MENKES) No. HK.01.07/Menkes/247/2020 (Pneumonia Coronavirus Baru (COVID-19) tentang kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona 2019.

Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah/Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan.

wilayah hukumnya masing-masing, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta. Sebagai dasar kebijakan pemerintah pusat tentang pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, Pemerintah Desa Buda telah mengeluarkan sejumlah kebijakan penanggulangan virus corona untuk menghalau penyebaran virus corona di Desa Buntu Buda.

Namun, ketika kebijakan penanggulangan COVID-19 diterapkan di Desa Buntu Buda, realitas lokal berbeda dengan tujuan kebijakan semula, seperti saat banyak warga yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Alasan masyarakat desa tidak mematuhi upaya penanganan virus corona di desa adalah karena tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar dan rendahnya kesadaran diri dan pengetahuan masyarakat dalam ilmu kesehatan dalam menghadapi penyebaran virus corona. Adapun contoh ketidakpatuhan masyarakat desa dalam menghadapi penyebaran virus corona, seperti tidak memakai masker saat keluar untuk kegiatan sehari-hari, warga masih sering menggelar pesta pernikahan dan masih sering berkumpul di tempat keramaian seperti pasar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID 19 di Desa Buntu Buda ?
2. Faktor-faktor apa yang yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID 19 di Desa Buntu Buda ?
2. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda ?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Menjadi bahan bacaan dan referensi mengenai pemahaman mengenai Implementasi kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.
2. Penelitian bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta bagi peneliti untuk menambah wawasan serta pemahaman terkait Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa.

3. Sebagai referensi dan sumber penelitian terdahulu pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Implementasi

Implementasi juga merupakan tindakan atau implementasi dari rencana yang disiapkan dengan cermat. Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana dianggap sempurna, baru kemudian dilakukan tindakan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dikutip dari Pramadya, (2016)

implementasi adalah

*“Tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan kebijakan. Dapat dipahami bahwa eksekusi adalah tindakan dan pelaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan awal dari kebijakan yang ditetapkan”.*

Menurut pengertian implementasi yang dikutip oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam Wahab & Solicin, (2008)

*“Implementasi adalah untuk memahami bahwa apa yang sebenarnya terjadi setelah rencana tersebut dinyatakan efektif atau dirumuskan adalah fokus implementasi kebijakan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah disetujuinya pedoman kebijakan nasional, termasuk upaya pengelolaannya dan konsekuensi/efek aktual pada masyarakat atau peristiwa Dampak”.*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sampai keputusan kebijakan ditentukan atau tujuan dan sasaran ditentukan. Oleh karena itu, implementasi merupakan suatu proses kegiatan yan

dilakukan oleh partisipan yang berbeda, dan pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

**a. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi**

Banyak metode dalam implementasi kebijakan terkait dengan pelaksana sumber daya, metode, lingkungan dan keragaman dalam masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) berperan sebagai pelaksana dan berperan penting dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (1983) dikutip dari Supriyanto (2021) menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

**a. Karakteristik Masalah**

- 1) Pertama, yang pertama adalah kompleksitas persoalan seperti korupsi, kemiskinan, dan pengangguran. Oleh karena itu, masalah tersebut sangat mempengaruhi kesulitan atau kompleksitas strategi dalam implementasinya.
- 2) Kedua adalah bentuk jamak tinggi dari masing-masing kelompok sasaran. Dapat dijelaskan bahwa apabila kelompok sasaran homogen maka akan lebih mudah melaksanakan kegiatan, sebaliknya jika kelompok sasaran heterogen akan lebih sulit melaksanakan kegiatan karena setiap anggota kelompok memiliki tingkat pemahaman yang berbeda.
- 3) Suatu kebijakan dengan jumlah penduduk yang besar akan menjadi kendala yang kompleks dalam implementasinya, sebaliknya jika jumlah

penduduk sarannya sedikit maka rencana tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

- 4) Dalam kebijakan yang bertujuan memberikan pengetahuan kognitif, perubahan sikap sangat dihargai. Lebih mudah diterapkan daripada kebijakan yang ditujukan untuk mengubah perilaku dan sikap masyarakat.

#### **b. Karakteristik Kebijakan**

1. Isi kebijakannya jelas

Jika maksud dari isi kebijakan mudah dipahami, maka pelaksana akan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan, tetapi sebaliknya jika maksud kebijakan tidak jelas dan pelaksana sulit dipahami, implementasinya akan sangat sulit. Menerapkan kebijakan.

2. Kebijakan didukung

Artinya jika kebijakan tersebut didukung, maka kebijakan tersebut akan beroperasi dan diimplementasikan dengan benar. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan sosial dan material.

3. Jumlah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk kebijakan ini

Sumber daya keuangan adalah elemen kunci dari setiap proyek sosial, dan setiap proyek juga membutuhkan dukungan staf untuk melaksanakan pekerjaan administratif dan teknis serta pemantauan proyek, yang semuanya membutuhkan biaya.

4. Memiliki hubungan yang terkoordinasi dengan pelaksana

Jika ada kontribusi dan koordinasi yang baik antara pihak pelaksana dan lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan, kebijakan akan berjalan sesuai dengan tujuan dan prosedur..

### **c. Lingkungan Kebijakan**

1. Keadaan lingkungan sosial masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dalam implementasi kebijakan Tingkat kemajuan sosial dan teknologi di masyarakat menjadi pendukung implementasi kebijakan, karena masyarakat dengan kondisi sosial yang tinggi, pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, dan perkembangan teknologi akan mudah diterima dan dipahami untuk mengubah kebijakan. .

2. Dukungan publik terhadap kebijakan

Jika masyarakat berharap mendapatkan insentif dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan seperti penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemotongan pajak, maka akan mudah mendapatkan dukungan publik atas kebijakan tersebut.

3. Perilaku suatu kelompok dalam masyarakat seringkali mempengaruhi implementasi kebijakan dalam banyak hal, antara lain:

(1) Pemilih menggunakan kritik untuk mengganggu keputusan implementasi kebijakan

(2) Dengan menerbitkan komentar terkait dengan implementasi kebijakan, pemilih mempengaruhi pelaksana dan lembaga kegiatan dalam serangkaian cara.



## **b. Model-model Teori Implementasi Kebijakan**

### **a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978-1986)**

Model dalam dikutip dari Tachjan, (2020) implementasi kebijakan adalah :

#### **1. Kondisi eksternal yang dihadapi lembaga**

Kondisi eksternal yang muncul dalam proses implementasi kebijakan seringkali dimanifestasikan sebagai hambatan fisik seperti bencana alam, musim yang tidak mendukung proses implementasi, dan penyakit. Hal ini terjadi di luar rencana implementasi kebijakan karena tidak dapat dikendalikan dan pelaksana mengetahui kapan akan terjadi.

#### **2. Waktu dan sumber daya yang cukup untuk**

##### **mengimplementasikan rencana**

Kita harus selalu menyediakan dan mengatur waktu dan dana, materi dan sumber daya lain yang memadai yang sesuai dengan proses implementasi untuk mendukung implementasi kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan komprehensif dan memadai.

#### **3. Pemahaman yang mendalam dan konsistensi tujuan**

Diperlukan pemahaman yang jelas tentang implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal, dirumuskan secara jelas, dan dilaksanakan pada tempatnya. Kebijakan tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh semua pihak terkait, agar implementasi kebijakan dapat dipandu dengan benar oleh pelaksana.

#### **4. Tugas dirinci dan dalam urutan yang benar**

Dalam proses implementasi kebijakan, tugas harus dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan isi kebijakan, agar pekerjaan implementasi berjalan sesuai dengan kebijakan. Jika pelaksanaan tugas menyimpang dari persyaratan kebijakan, pelaksana harus mengambil tindakan korektif yang diperlukan. rencana.

##### **b. Edward III dalam Subarsono (2010)**

Edward III menyatakan dalam Subarsono (2010) dalam Kusnadi (2018) bahwa ada empat variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah sarana untuk memperluas informasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi dari atasan ke bawahan, maka harus ada jadwal penyampaian informasi yang harus jelas.

##### **2. Sumber Daya**

Sumber daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena jika sumber daya pendukung tidak tersedia, implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sumber-sumber ini termasuk:

- a. Personil yang relatif memadai, dengan pengetahuan dan keterampilan profesional untuk mengimplementasikan kebijakan.

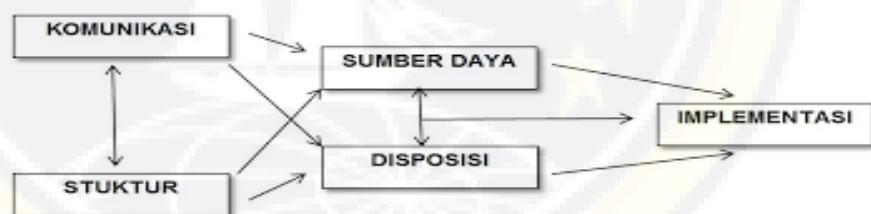
- b. Informasi yang cukup atau relevan untuk tujuan implementasi
- c. Dukungan lingkungan untuk kelancaran implementasi kebijakan
- d. Kekuatan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan

### 3. Kepribadian atau sikap

Mengenai sikap pelaksana untuk mendukung implementasi kebijakan. Umumnya, pelaksana mendukung pelaksanaan suatu rencana untuk melaksanakan kebijakan, tergantung pada lingkup kewenangan yang dimilikinya.

### 4. Struktur Birokritis

Suatu kebijakan seringkali melibatkan banyak instansi atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan.



**Gambar 1. 1** Pengaruh Komunikasi, Sumber daya, Sturktur, Disposisi terhadap Implementasi

**c. Marilee S. Grindle, dalam Subarsono tahun 1980 (2005:93)**

Implementasi kebijakan di kutip dari Lambelanova, (2017) dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (content of police) dan lingkungan implementasi (latar belakang kepolisian). Variabel isi kebijakan meliputi: Pertama, sejauh mana isi kebijakan mencakup kelompok sasaran atau kepentingan kelompok sasaran. Kedua, jenis manfaat yang diperoleh kelompok sasaran. Ketiga, sejauh mana kebijakan tersebut diharapkan berubah. Keempat, apakah lokasi program sudah benar. Kelima, apakah kebijakan menyebutkan pelaksana secara rinci; keenam, apakah proyek memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukungnya. Sementara itu, variabel lingkungan kebijakan meliputi: Pertama, seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para partisipan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kedua, karakteristik penguasa dan rezim. Ketiga, tingkat kepatuhan dan respon kelompok sasaran.

**d. Charles Jones (Solichin, 2005: 9)**

Dalam proses kebijakan, menurut Charles Jones di kutip dari (Solichin, (2008), setidaknya ada 4 (empat) kelompok atau jenis aktor yang terlibat, yaitu: kelompok rasional, kelompok teknis, kelompok progresif dan kelompok sosialis reformasi. Uraian berikut akan menjelaskan bagaimana masing-masing kelompok peserta tersebut dalam proses kebijakan.

## **1. Golongan Rasional**

Dengan menggunakan metode yang masuk akal ini, diasumsikan bahwa semua tujuan dapat ditentukan sebelumnya dan informasi atau data yang lengkap dapat diberikan. Oleh karena itu, gaya kerja kelompok rasional cenderung. Ini seperti gaya kerja manusia yang holistik, yaitu, mencoba menganalisis semua aspek dari setiap pilihan yang mungkin, serta semua konsekuensi dari pencapaian tujuan yang ditetapkan dan mendukung orang.

## **2. Golongan Teknisi**

Sekelompok teknisi mungkin memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi hal ini terbatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya, dalam hal ini sebagai tenaga ahli atau peran tenaga ahli yang membutuhkan tenaganya untuk menangani tugas-tugas tertentu.

## **3. Golongan Inkrementalis**

Aktor progresif sama dengan politisi, mereka seringkali sangat pemilih, namun seringkali kurang sabar dengan cara kerja para perencana dan teknisi, padahal sebenarnya mereka sangat bergantung pada apa yang mereka lakukan.

## **4. Golongan Reformis**

Para reformis pada dasarnya menyadari bahwa informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses kebijakan terbatas.

Nilai-nilai yang mereka anut adalah yang berkaitan dengan upaya melakukan perubahan sosial. Gaya kelompok aktor reformis ini umumnya sangat radikal, seringkali disertai dengan aksi-aksi demokrasi dan konfrontasi dengan pemerintah..

e. **William Dunn**

Proses analisis kebijakan (Dunn, 2003) merupakan rangkaian kegiatan dalam proses kegiatan politik. Aktivitas politik didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan

Saling ketergantungan, yaitu:

1. Penyusunan agenda,
2. Pembuatan kebijakan,
3. Mengadopsi kebijakan,
4. Implementasi kebijakan, dan
5. Evaluasi Kebijakan

**Analisis kebijakan berorientasi masalah**



**Gambar 1. 2** Analisis kebijakan (William Dunn (1994))

#### **F. Samodra Wibawa (1994: 50)**

Menurut Samodra Wibawa (1994:50) , kebijakan adalah suatu sistem dari tiga komponen yang saling mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah aktor kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi. Komponen- komponen ini dapat dijelaskan secara rinci:

1. Peserta kebijakan, yaitu instansi pemerintah atau orang atau badan nonpemerintah yang ikut serta dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan pada saat yang sama.
2. Lingkungan kebijakan. Lingkungan tidak mengacu pada orang atau lembaga yang mempengaruhi pemerintah sebagai penentu akhir kebijakan (mereka semua termasuk dalam aktor/pelaku kebijakan dalam Kotak 14), tetapi berarti bahwa kehidupan masyarakat dapat atau perlu dipengaruhi oleh peserta kebijakan.
3. Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah yang diambil untuk menghadapi tantangan (atau memecahkan masalah) dalam kehidupan masyarakat.

#### **g. Randall B. Ripley dan Grace A.Frangklin dalam Policy Implementation and Bereacracy**

Dikutip dari Goldschlag (2019) Tuliskan tiga konsep variabel implementasi kebijakan yang berhasil, yaitu:

- a. Semacam. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku  
Keberhasilan implementasi dipahami sebagai kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan rencana).
- b. Rutinitas berjalan lancar dan tidak ada kendala yang menandakan implementasi berhasil.
- c. Keberhasilan implementasi mengacu pada implementasi semua rencana dan dampak (manfaat) yang diharapkan..

**i. Teori David L Weimer dan Aidan R.Vinning**

Menurut pandangan Subarsono dari Weimer Dan Vining (1999:396), dikutip dari buku *Analisi Kebijakan* (2020) ada tiga kelompok utama variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana, yaitu: (1) logika kebijakan, (2) lingkungan di mana kebijakan beroperasi, dan (3) kemampuan pelaksana kebijakan.

1. Logika kebijakan dimaksudkan untuk membuat implementasi kebijakan masuk akal, dengan dukungan teoritis.
2. Lingkungan dimana kebijakan beroperasi akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Kemampuan pelaksana kebijakan untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan dan tingkat keterampilan pelaksana kebijakan.



Dari berbagai model teori implementasi kebijakan di atas, saya menggunakan Weimer Dan Vining (1999:396) dan teori support and restraint Edward III dikutip dari Hanamunika (2021).

**j. Gow dan Morss (dalam Pasolong, 2013)**

Disebutkan, beberapa faktor menjadi penghambat implementasi kebijakan tersebut di kutip dari Tumanan & Negara, (2017).

**Pertama** adalah hambatan politik. Ketika para peserta memiliki berbagai “kepentingan” sehingga kebijakan yang direncanakan tidak mencapai tujuan, hambatan politik akan muncul.

**Kedua** adalah sistem yang lemah. Artinya ada berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi kebijakan, pengetahuan kebijakan, dan implementasi kebijakan itu sendiri. Namun terkadang hal ini bisa menjadi kendala ketika pelaksana tidak sepenuhnya memahami kebijakan yang akan diterapkan.

**Ketiga**, inkompetensi sumber daya manusia. Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan dapat dibagi menjadi bidang teknis dan administratif. Terkadang masyarakat bingung ketika ada kebijakan baru. Hal ini terkait erat dengan pemberitahuan kebijakan dan rencana baru, yang akan menimbulkan kekecewaan di masyarakat.

**Keempat**, perbedaan target agenda para aktor. Biasanya dalam merumuskan suatu kebijakan, setiap peserta kebijakan mempunyai tujuan tersendiri untuk mencapai kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang terjadi tidak ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi “hanya” untuk kepentingan masing-masing peserta yang berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Mempersiapkan.

## B. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah infrastruktur dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dengan kata lain, kebijakan adalah pengelolaan untuk mencapai tujuan nasional, dan kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian pilihan yang saling terkait (termasuk keputusan tidak bertindak) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan Menurut kebijakan James P. Lester dikutip dari Rushananto, (2014):

*“Proses atau rangkaian keputusan atau kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk memecahkan masalah publik.”*

Sementara itu, menurut Mustopadidja (1992:30) dikutip dari (Rushananto, 2014):

*“Istilah kebijakan biasanya digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah dan perilaku negara secara umum, dan untuk menggambarkan kebijakan.”*

Dilihat dari beberapa ungkapan definisi kebijakan di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah :

1. Keputusan atau tindakan bersama yang dibuat oleh pemilik kekuasaan (pemerintah).
2. Dipandu oleh kepentingan publik, pertimbangkan baik-baik pro dan kontra dan kemungkinan dampaknya.
3. Memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah.  
Dengan mengikuti siapa, kapan dan bagaimana.

Selain itu, ada empat hal yang dikatakan terkait dengan kebijakan, yaitu

:

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi pada tujuan harus menjadi fokus utama dari perilaku acak atau keadaan darurat.
2. Kebijakan adalah model pejabat pemerintah mengenai perilaku diskresi individu mereka
3. Kebijakan harus mencakup apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah atau apa yang mereka lakukan.
4. Bentuk aktif kebijakan didasarkan pada ketentuan hukum dan kekuasaan. Tujuan kebijakan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah.

Setiap produk kebijakan harus menunjukkan esensi situasi sasaran dan menghasilkan rekomendasi yang mempertimbangkan berbagai rencana yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagai tujuan kebijakan untuk menghasilkan produk kebijakan. Menurut konsep pengertian kebijakan yang ditekankan oleh Abdul Wahab dikutip dari Tumanan & Negara, (2017) beberapa orang lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut: Kebijakan harus dibedakan dari keputusan, dan setidaknya ada perbedaan antara kebijakan dan keputusan. Tiga perbedaan mendasar Keputusan, yaitu:

- 1) Lingkup kebijakan jauh lebih besar daripada pengambilan keputusan.
- 2) Pemahaman tentang kebijakan yang lebih besar membutuhkan penelitian mendalam tentang pengambilan keputusan.
- 3) Kebijakan biasanya mencakup upaya untuk melacak interaksi yang terjadi antara begitu banyak individu, kelompok, dan organisasi.

Oleh karena itu, kebijakan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor politik ketika memilih tujuan dan cara mencapainya. Dari pengertian di atas, sebenarnya kebijakan sangat mudah dipahami, karena berarti melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan nasional. Kebijakan juga mudah diukur, karena pengukurannya jelas, yaitu derajat kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, tetapi bukan berarti kebijakan itu mudah dirumuskan, mudah diterapkan, dan mudah dipantau. kebijakan tersebut melibatkan faktor hukum dan politik, Apalagi jika bersinggungan dengan faktor ekonomi, periode implementasi kebijakan di Indonesia membuktikan hal tersebut.

### **1. Jenis Kebijakan**

James E. Anderson (1970) diikuti dari Suaib, (2016) mengklasifikasikan jenis kebijakan sebagai berikut :

#### **a. Kebijakan materi**

Merupakan kebijakan yang dilihat dari esensi permasalahan yang dihadapi pemerintah, seperti kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain.

#### **b. Kebijakan produksi**

Kebijakan produksi adalah kebijakan dari sudut pandang semua pihak yang terlibat dalam perumusan, misalnya Kementerian Pendidikan mengesahkan perumusan “Undang-Undang Pendidikan”.

#### **c. Didistribusi**

Distributif adalah kebijakan yang mengatur pemberian jasa/manfaat kepada individu, kelompok atau perusahaan. Misalnya, kebijakan pajak liburan.

**d. Redistribusi**

Redistribusi adalah kebijakan yang mengatur tentang pendistribusian kekayaan, kepemilikan dan pemindahan hak. Misalnya, kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

**e. Pengawasan**

Pengawasan adalah kebijakan yang mengatur perilaku yang dibatasi/dilarang. Misalnya, kebijakan pelarangan kepemilikan dan penggunaan senjata api.

**f. Kebijakan materi**

Kebijakan material adalah kebijakan yang mengatur alokasi/penyediaan sumber daya material yang berwujud bagi penerimanya. Misalnya, kebijakan pembangunan perumahan sederhana.

**2. Tingkatan Kebijakan**

Ada tingkatan kebijakan Nugroho (2006:31) dikutip dari Dwiyanto (2017) menegaskan bahwa rangkaian atau tingkatan kebijakan Indonesia secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kebijakan makro atau umum atau dasar, yaitu (a) UUD 1945 (b), UU/Perpu, (c) peraturan pemerintah, (d) peraturan presiden, dan (e) peraturan daerah.
2. Kebijakan yang diimplementasikan sebagai (dalam) atau dalam kebijakan atau interpretasi kebijakan ini dapat berupa peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan walikota, dan peraturan bupati. Kebijakan tersebut juga dapat berupa surat keputusan atau SKB antara menteri, gubernur, walikota, dan bupati.
3. Kebijakan mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Bentuk kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat publik di bawah kepemimpinan menteri, gubernur, walikota, dan bupati.

Dari uraian tingkat kebijakan di atas, terlihat bahwa kebijakan berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah merupakan kebijakan yang mempunyai arti strategis tetapi belum dilaksanakan, karena masih memerlukan kebijakan tindak lanjut atau kebijakan penjas atau apa. biasa disebut sebagai pedoman pelaksanaan.

## **Proses Formulasi Kebijakan**

Dalam Winarno (1999: 77) dikutip dari Rushananto, (2014) proses perumusan kebijakan dibagi menjadi tahap perumusan masalah kebijakan, yaitu:

### **1. Perumusan masalah kebijakan**

Pembuatan masalah dalam kebijakan merupakan langkah dimana pembuat kebijakan mengidentifikasi dan menemukan cara untuk memecahkan masalah kebijakan setelah melalui proses ini, dan kemudian pengambil keputusan membuat pernyataan masalah yang jelas. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah sehingga pengambil keputusan dapat memahami sifat masalah terlebih dahulu, sehingga lebih mudah untuk menentukan sifat proses pembuatan kebijakan.

### **2. Model penyusunan agenda kebijakan**

Pembuat kebijakan akan memilih dan memproses kebijakan melalui tahapan sebagai berikut:

#### **a. Semacam. Definisi masalah**

Mendefinisikan isu-isu dalam agenda adalah untuk pembuat kebijakan untuk mengatasi isu-isu prioritas dalam agenda.

#### **b. Agenda proposal**

Usulan agenda memuat isu-isu yang telah mencapai level proposal, artinya ekspresi isu telah berubah selama tahap resolusi isu.

#### **c. Penawaran agenda**

Rekomendasi kebijakan yang telah diselesaikan dalam agenda kemudian akan memberikan dukungan aktif.

d. Pembahasan agenda

Kemudian pengambil keputusan akan membahas dan mengevaluasi hasil penyusunan agenda.

**3. Proses Usulan Perumusan Kebijakan**

Tahap ini merupakan kegiatan yang menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah, antara lain sebagai berikut.

a. Semacam. Identifikasi alternatif dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dapat diselesaikan dengan alternatif kebijakan baru yang sudah ada tetapi masalahnya baru, oleh karena itu pembuat kebijakan dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru, sehingga setiap alternatif Skema memiliki fitur yang jelas. Memberikan alternatif yang benar dan jelas untuk setiap kebijakan akan memfasilitasi pengembangan alternatif.

b. Tujuan dari mendefinisikan dan merumuskan alternatif adalah agar setiap alternatif yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan memiliki pemahaman yang jelas. Semakin jelas pemahaman tentang alternatif, semakin mudah bagi pengambil keputusan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari setiap alternatif.



- c. Mengevaluasi alternatif atau bobot kegiatan untuk setiap alternatif sehingga jelas bahwa setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dengan memahami bobot setiap
- d. alternatif, pengambil keputusan dapat menentukan alternatif mana yang lebih cocok untuk evaluasi yang benar dari berbagai alternatif, yang memerlukan standar tertentu dan informasi terkait.
- e. Pengambil kebijakan akan memilih kebijakan yang bernilai positif sebagai alternatif pilihan kebijakan. Setelah pengambil kebijakan menyelesaikan proses evaluasi terhadap alternatif kebijakan yang akan dipilih, alternatif kebijakan tersebut akan ditentukan dan dilaksanakan oleh pembuat kebijakan.

#### **4. Pengesahan Kebijakan**

Menurut Anderson (1966: 80) persuasi dan persuasi merupakan langkah awal dalam menyetujui suatu kebijakan. Persuasi berusaha membujuk seseorang untuk mengambil tindakan yang tepat sehingga mereka dapat menerima kebijakan tersebut. Gaining adalah proses di mana dua orang atau lebih dengan kekuasaan atau otoritas mengatur dan menyesuaikan beberapatujuan bersama untuk merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama (Suaib, 2016).

#### **4. Kesalahan Umum dalam Pembuatan Kebijakan**

Dalam merumuskan kebijakan, Nigro (Islamy, 1986; 25-26) dikutip dari Suaib, (2016) melakukan tujuh kesalahan umum dalam merumuskan kebijakan, sebagai berikut:

## **1. Pola pikir sempit**

Pemikiran yang sempit akan menjadi salah satu alasan mengapa pengambil keputusan gagal menemukan masalah, karena pengambil keputusan yang berpikiran sempit hanya memperhatikan masalah saat ini, sering berasumsi bahwa mereka merumuskan kebijakan hanya untuk kepentingan saat ini, dan tidak mempertimbangkan bagaimana dampak kebijakan di masa depan. Akibat dari pola pikir ini, jika kebijakan di masa depan akan terjadi dan peristiwa negatif akan terjadi di masa depan dan merugikan masyarakat dan pemerintah, pembuat kebijakan tidak akan memasukkan langkah-langkah yang diharapkan dalam kebijakan tersebut. Akibat pengaruh kebijakan, pembuat kebijakan tidak menganalisis, memikirkan dan mempersiapkan secara detail. Hal ini karena pembuat kebijakan berpikiran sempit ketika merumuskan kebijakan dan gagal mempertimbangkan konsekuensi dari implementasi kebijakan di masa depan.

## **2. Adanya persepsi bahwa peristiwa masa lalu akan terjadi lagi di masa yang akan datang**

Peristiwa masa lalu sangat berbeda dengan yang akan terjadi di masa depan, sehingga pembuat kebijakan harus dapat memprediksi efek dari kebijakan yang dirumuskan saat ini di masa depan. Saat ini, masyarakat dan pemerintah cenderung menganggap bahwa perubahan adalah hal yang wajar dan biasa terjadi karena waktu selalu bergerak dari waktu ke waktu. Namun ketika merumuskan kebijakan, pembuat kebijakan harus memperhatikan, menentukan dan mempertimbangkan dampak dan konsekuensi dari implementasi kebijakan tersebut, dan sangat penting

untuk melihat apa dampak positif atau negatif dari kebijakan yang diterapkan hari ini terhadap masa depan.

### **3. Pemecahan Masalah**

Pemecahan masalah yang sederhana akan selalu ditolak oleh pemerintah, karena pemecahan masalah yang sederhana tidak sesuai dengan prosedur perencanaan kebijakan. Pemikiran yang sempit menyulitkan pengambil keputusan untuk sekedar memecahkan masalah, hanya melihat masalah, dan secara tidak sengaja menemukan akar penyebabnya, serta mempelajari penyebab masalah yang sedang dihadapi dan akan dipecahkan.

### **4. Mengandalkan pengalaman seorang**

Sebagai pengambil keputusan, sangat penting untuk dapat membimbing bawahan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga menuntut pembuat keputusan untuk terus belajar baik teori maupun praktik. Ketika merumuskan kebijakan, orang yang biasanya memiliki pengalaman kerja dalam merumuskan dan menyusun kebijakan yang baik akan selalu menjadi orang yang selalu diandalkan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Tetapi ini adalah pemikiran yang salah dari seorang pemimpin, karena dalam merumuskan kebijakan, pemimpin harus mengusulkan model kerjasama tim dan kepemimpinan. Seseorang sebagai pemimpin seharusnya tidak hanya mengandalkan dan mengandalkan satu orang dalam pengambilan keputusan, tetapi juga bagaimana pemimpin harus membimbing Semua bawahan dan kolega bekerja

sama dan bernegosiasi untuk merumuskan kebijakan yang berguna bagi masyarakat.

## **5. Konsep dasar proses pengambilan keputusan**

Ilmu sosial sangat berguna dalam pembuatan kebijakan, tetapi terbatas ketika didasarkan pada konsep bahwa dalam banyak kasus, keputusan berdasarkan konsep pengambilan keputusan ini tidak salah, tetapi secara konseptual, dalam pengambilan keputusan, ada sering mempertimbangkan sikap tidak jujur tentang hal-hal seperti itu. Namun jika keputusan diambil dalam ilmu administrasi, maka keputusan tersebut akan menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas, karena dengan menggunakan ilmu administrasi untuk memproses keputusan tersebut, pengambil keputusan akan memahami dan memahami kelebihan dan kekurangan dari keputusan tersebut dan bagaimana mengelola kebijakan tersebut. Pemikiran subjektif hanya akan menghalangi pengambil keputusan dalam mengimplementasikan keputusan.

## **6. Uji Coba Strategi**

Uji coba strategi merupakan metode yang harus dilakukan oleh pelaksana yang bertujuan untuk memahami kualitas dan kelemahan strategi, memahami isi strategi secara rinci dan jelas, serta maksud dan tujuan strategi. Kebijakan yang akan dilaksanakan. Pengambil keputusan sering menemui kendala saat melakukan eksperimen. Hambatan tersebut disebabkan oleh alokasi pekerjaan yang banyak, waktu yang sedikit dan lebih banyak, dan sering terjadi

karena pengambil keputusan memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap anggotanya.

#### **7. Tidak mau mengambil keputusan**

Perasaan enggan seringkali membuat orang curiga dan tidak mau mengambil keputusan. Alasan keengganan seseorang mungkin karena seseorang percaya atau berasumsi bahwa melaksanakan suatu tindakan pengambilan keputusan adalah tugas yang sangat sulit, berat dan berisiko tinggi, serta tidak ingin mengalami kemunduran. Ketika merumuskan kebijakan, mentalitas yang salah ini dapat menimbulkan mentalitas yang buruk dan berbahaya, apalagi jika pengambil keputusan memiliki mentalitas ini, karena kebijakan yang akan ia rumuskan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Tidak mau hilang dari benaknya, pengambil keputusan harus mengambil tindakan untuk meminimalkan kesalahan dalam pembuatan kebijakan, sehingga dengan mengurangi kesalahan dalam proses pembuatan kebijakan, mengurangi hambatan implementasi kebijakan di bidang ini dan kesalahan dalam pembuatan kebijakan akan mengurangi pengambilan keputusan. masyarakat dan kebijakan yang mereka buat.

Pengamatan menjelaskan kesalahan dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yang ada saat ini masih memiliki banyak kekurangan, misalnya kebijakan desa belum memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Isu ini sangat merugikan kedua belah pihak yaitu masyarakat dan pengambil keputusan. Alasan untuk masalah ini adalah karena pengambil keputusan tidak memiliki

pengetahuan kepemimpinan, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, dan tidak ada penerapan pengetahuan ilmu sosial.

Untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan, inovasi ilmiah harus dilakukan dalam bentuk paradigma baru ilmu kebijakan baru, dan ilmu kebijakan harus menyertakan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan paradigma terbaru, ilmu kebijakan harus berbentuk :

- a. Semacam. Rumusan kebijakan yang benar adalah kebijakan yang suatu metode telah mengalami proses pembaruan, pengetahuan dan konten di dalamnya tidak berhubungan langsung, karena konten kebijakan melibatkan proses pengembangan masyarakat.
- b. Proses pengambilan keputusan, baik secara kelompok, organisasi maupun individu, perlu mendapat perhatian dalam sistem pengambilan keputusan di tingkat transformasi makro, di tingkat nasional, dan di tingkat daerah, dan fokus pada perspektif pengambilan keputusan.
- c. Unsur disiplin ilmu yang terkait diserap dan dikelola, kemudian beroperasi secara interdisipliner.
- d. Mengintegrasikan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan
- e. Memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan pembuat kebijakan
- f. Berpartisipasi dengan berpartisipasi secara mendalam dalam mengubah kondisi sosial dan menghadapi perubahan.

## **5. Ciri pokok Masalah Kebijakan**

William Dunn, (1999) mengemukakan empat ciri utama isu kebijakan dalam bukunya “Policy Analysis”, yaitu:

- a. Semacam. Isu kebijakan adalah bagian dari keseluruhan sistem isu, bukan entitas independen. menganggap saling ketergantungan.
- b. Masalahnya mungkin disebabkan oleh faktor subjektif eksternal, seperti masalah upaya selektif untuk mengevaluasi, mengklarifikasi, dan mendefinisikan.
- c. Sebuah kebijakan buatan. Sifat masalah dalam kebijakan perlu diubah, dipelihara, dipahami dan dipelihara.
- d. Dalam menentukan solusi masalah, sesuai dengan perspektif dan dinamika masalah dalam kebijakan, terdapat solusi dan usulan untuk memecahkan masalah yang dihadapi seseorang..

## **6. Dampak Kebijakan**

Dampak kebijakan berarti bahwa semua bentuk dampak pada kebijakan adalah dampak keseluruhan dari kebijakan dalam suatu keadaan tertentu. Menurut Anderson (1984), semua biaya dan manfaat dari kebijakan ini termasuk yang langsung dan yang akan datang. Itu harus diukur dalam hal efek simbolis atau nyata. Output kebijakan adalah keputusan pemerintah. Rencana kegiatan diukur menurut standar yang telah ditentukan, dan hasil kegiatan akan menghasilkan beberapa informasi tentang pengeluaran (hasil) dan dampak negatif dari kebijakan untuk menghindari kesalahan dalam implementasi kebijakan (Suaib, 2016).

**a. Dampak kebijakan pada situasi atau kelompok sasaran**

Target audiens dalam strategi harus menjadi contoh yang jelas. Anak sekolah, orang miskin dan pekerja. Ketika merumuskan kebijakan, harus ada tujuan untuk perubahan. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan pemerintah perlu dipertimbangkan apakah kebijakan yang akan dilaksanakan akan berdampak pada tujuan awal perumusan dan perumusan kebijakan.

**b. Dampak kebijakan Teluk pada kondisi saat ini dan masa depan**

Dapat dikatakan bahwa dampak positif dari kebijakan ini menegaskan keinginan masyarakat untuk merespon konsep otonomi daerah yang baru dilaksanakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dampak dari kebijakan ini terhadap otonomi daerah masa kini dan masa depan Situasi sulit diprediksi, karena kebijakan yang dirumuskan saat ini akan berubah seiring waktu dan kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan apa yang akan terjadi di daerah atau kota dan kebijakan yang akan datang, namun kebijakan yang dirumuskan dalam kondisi saat ini seringkali bermanfaat dan berdampak pada kondisi masa depan. , kebijakan ini Pasti akan berdampak di masa depan. Ke depan, penanganan virus corona akan memakan waktu yang lama. Untuk meminimalisir penyebaran di masa mendatang, vaksin virus corona yang diproduksi saat ini akan terus dikembangkan dan ditingkatkan saat ini hingga masa yang akan datang.

**C. Pengertian COVID-19**

COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease of 2019 penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang disebut SARS-CoV-2 atau juga dikenal sebagai



coronavirus. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan dapat dengan mudah menyebar dari satu orang ke orang lain, sehingga belum ditemukan vaksin COVID-19. Menurut WHO (World Health Organization) COVID-19 dilambangkan dengan COVI dan D adalah singkatan dari disasea (penyakit). virus corona baru 2019 (2019-nCoV). Coronavirus termasuk dalam keluarga coronavirus, subfamili, orthocoronavirus dan Nidovirales. Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona, yang berarti "ruang kosong" atau "mahkota." Karena memiliki tepi di permukaan virus, ia memiliki duri besar yang menyerupai mahkota. Coronavirus adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia (termasuk manusia, unggas, dan ikan). Pada manusia, virus corona dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, seperti influenza dan suhu tubuh manusia melebihi 38 derajat.

### **1. Gejala COVID-19**

Jika seseorang terinfeksi COVID-19, ada beberapa gejala, yaitu:

#### **a. Mengalami demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius**

Jika Anda terinfeksi COVID-19, gejala pertama adalah seseorang akan mengalami demam tinggi, sekitar 38 derajat Celcius ke atas.

#### **b. Kehilangan indra penciuman di hidung dan indra perasa di lidah**

Jika Anda terinfeksi COVID-19, gejala kedua yang akan Anda rasakan adalah hidung seseorang kehilangan penciuman, sehingga penderita sulit untuk mencium dan mengenali bau yang ada di hidung dan kehilangan indra penciuman. Lidah membuat makanan dan minuman terasa hambar dan hambar di lidah.

**c. Sesak napas**

Jika Anda terinfeksi COVID-19, gejala ketiga yang akan Anda rasakan adalah seseorang akan mengalami sesak napas dalam jangka waktu tertentu.

**d. Badan terasa lemas**

Jika Anda terinfeksi COVID-19, gejala keempat yang akan Anda rasakan adalah seseorang akan merasa lemas dan sulit untuk bergerak

**2. Cara Penularan COVID-19**

COVID-19 dapat menyebar dari satu orang ke orang lain dengan cara berikut:

**a. Cairan lendir**

Tetes atau percikan cairan yang dikeluarkan oleh pasien COVID-19 melalui hidung atau mulut, seperti batuk dan bersin.

**b. Kontak dekat**

Seperti seseorang yang melakukan kontak fisik dengan pasien COVID-19. Misalnya, ketika seseorang berjabat tangan dengan pasien COVID-19.

**c. Menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh COVID-19**

Ketika seseorang bersentuhan dengan benda yang disentuh oleh orang yang terinfeksi COVID-19 karena virus corona, ia dapat bertahan pada benda aluminium dan besi selama 8 jam, dan pada kayu, kaca, kertas, dan plastik hingga 5 hari.

### 3. Cara Penanggulangan COVID-19

Adapun cara penanganan COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan yaitu:

#### a. Mencuci tangan

Dengan mencuci tangan, COVID-19 di tangan Anda akan mati. Caranya adalah dengan membersihkan tangan dengan sabun sambil mencuci tangan selama 20 detik.

#### b. Pakai masker

Pakailah masker saat keluar karena membantu mencegah virus di udara masuk ke dalam tubuh

#### c. Jaga jarak (social distancing)

Saat berada di luar ruangan, selalu jaga jarak dengan orang lain dan jauhi tempat keramaian untuk menghindari penyebaran virus COVID-19.

#### d. Menerapkan pola hidup sehat

Perbanyak makan makanan bergizi seperti buah dan sayur, perbanyak minum air putih, olahraga ringan di rumah, berdoa, berpikir positif, dan meningkatkan daya tahan tubuh.

### D. Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda

Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 desa Buntu Buda ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai respon terhadap masuknya virus corona ke desa tersebut. Saat menerapkan kebijakan penanggulangan COVID-19, pemerintah desa bekerjasama dengan tim klaster relawan COVID-19 yang dibentuk

atas pemberitahuan Bupati Mamasa untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.

**a. Pelaksanaan Kebijakan penanggulangan COVID-19 di desa Buntu-Buda**

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan publik melalui prosedur, kegiatan, tindakan, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan kepala desa adalah mengatur kekuasaan pemerintahan, menyelaraskannya, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Menurut teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dikutip dari Tachjan, (2020)

*“Masyarakat dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu: konten kebijakan; dan lingkungan implementasi (implementation environment). Variabel-variabel tersebut meliputi: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dimasukkan dalam konten kebijakan; Jenis manfaat; tingkat perubahan yang diharapkan dalam kebijakan; apakah lokasi program ditempatkan dengan benar; apakah kebijakan menentukan pelaksanaannya secara rinci; dan apakah proyek didukung oleh sumber daya yang memadai” .*

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikutip dari Kadji, (2016) mengemukakan bahwa “ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu: karakteristik masalah (*solvability of the problem*), kebijakan/hukum (*kemampuan merumuskan struktur implementasi*), dan variabel lingkungan (*variabel non-hukum yang mempengaruhi implementasi*)”

Pada saat yang sama, menurut pandangan Subarsono tentang Weimer dan Vining (1999:396).

*“Ada tiga jenis variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana, yaitu: (1) logika kebijakan, (2) lingkungan operasi kebijakan, (3) kemampuan pelaksana kebijakan.*

- 1. Logika kebijakan dimaksudkan untuk membuat implementasi kebijakan masuk akal, dengan dukungan teoritis.*
- 2. Lingkungan dimana kebijakan beroperasi akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.*
- 3. Kemampuan pelaksana kebijakan untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan dan tingkat keterampilan pelaksana kebijakan.”*

Implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda dilakukan setelah pemerintah desa menggelar rapat dan pembahasan agenda dengan kelompok adat masyarakat dan kepala desa. Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Penularan COVID-19 di Indonesia telah merumuskan kebijakan nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona (COVID-19) 2019 dikutip dari Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 247, 2020.

Bentuk implementasi kebijakan pemerintah desa dalam penanggulangan COVID-19 di Desa Buda adalah:

**a. Pelaksanaan Sosialisasi COVID-19**

Saat melaksanakan rencana Sosialisasi Penanganan COVID-19, Pemerintah Desa Buntu Buda bekerjasama dengan SATGAS COVID-19 menghimbau kepada seluruh masyarakat desa agar selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan, dan

menjaga jarak dari orang lain untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Guna mengantisipasi kepadatan warga saat proses Sosialisasi dan sosialisasi dapat merata dan tuntas di setiap dusun dalam desa maka, pemerintah desa berinisiatif melakukan program sosialisasi keliling, dengan menggunakan fasilitas roda empat yang dilengkapi dengan beberapa alat pengeras suara untuk memberikan sosialisasi penanganan COVID-19 untuk setiap dusun dalam desa Buntu Buda.

**b. Pengadaan fasilitas pencuci tangan**

Selanjutnya pemerintah desa Buntu Buda untuk menerapkan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 adalah menyiapkan sarana dan fasilitas pencegahan COVID-19, seperti menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk desa dan setiap tempat umum, seperti seperti pasar, taman dan setiap rumah ibadah di setiap desa dan dusun. Langkah ini diambil pemerintah desa Buntu Buda, tujuannya agar seluruh warga desa terhindar dari penyebaran COVID-19 di tempat-tempat umum seperti pasar, taman dan tempat ibadah, serta warga desa yang masuk atau melewati dapat ikut serta dalam menanggulangi COVID-19 di Desa Buntu Buda dengan cara mencuci tangan di tempat pencucian tangan yang telah disediakan oleh pemerintah desa untuk mencegah penyebaran COVID-19.

**c. Penyemrotkan disinfektan.**

Pelaksanaan penanggulangan COVID-19 yang terakhir dari implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu

Buda adalah melaksanakan rencana penyemprotan disinfektan di setiap jalan dan tempat umum seperti pasar, taman, dan tempat ibadah oleh kelompok relawan COVID-19 tersebut, dengan tujuan mensterilkan virus pada benda-benda di, pasar dan rumah ibadah, dan membunuh virus corona yang mengendap di udara jalan dan setiap tempat umum di Desa Buntu Buda.

**b. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda**

Dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda, ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tanggap COVID-19, yaitu:

**a. Faktor pendukung implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa**

Adapun faktor pendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda terbagi menjadi tiga, yaitu:

**a. Kesadaran masyarakat desa untuk mematuhi protokol kesehatan**

Faktor pendukung utama yang berperan penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 adalah kesadaran di setiap masyarakat desa bahwa sangat penting untuk mencegah dan mengatasi risiko tertular COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker saat keluar dan secara teratur Cuci tangan dan batasi jarak dengan orang lain, serta jauhi tempat ramai saat melakukan aktivitas sehari-hari.

**b. Menambah jumlah tenaga kesehatan**

Saat menerapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda, salah satu upaya pemerintah desa yang paling tepat untuk pencegahan COVID-19 adalah dengan menambah jumlah tenaga kesehatan di setiap rumah sakit desa. Tenaga kesehatan berperan penting dalam penanganan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 dan berada di garda terdepan. Dengan cara menambah jumlah kesehatan dapat mempercepat dan mendukung implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di masyarakat desa.

**c. Menyediakan sarana dan fasilitas tempat cuci tangan di setiap tempat umum**

Dalam menangani COVID-19 di Desa Buntu Buda, pemerintah desa perlu menyediakan jumlah fasilitas pencucian tangan yang cukup untuk mendukung kegiatan pencegahan virus corona di Desa Buntu Buda, seperti pasar, gereja, dan taman. Penyediaan fasilitas ini dapat mendukung terlaksananya pelaksanaan kebijakan karena jumlah fasilitas menjadi pendorong dalam menurunkan penularan COVID-19

**b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda**

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 Desa Buda terbagi menjadi tiga, yaitu:

**1. Masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan**



Saat menerapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda, salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 adalah sikap masyarakat yang tidak memperhatikan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti tidak memakai masker dan masih sering berkumpul.


## **2. Rendahnya pengetahuan kesehatan masyarakat desa**

Sebagian besar penduduk desa menganggap virus corona hanya flu biasa, dan sebagian masyarakat menganggap virus corona tidak berbahaya. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ilmu kesehatan. Seperti yang kita ketahui virus corona di dunia kesehatan adalah virus yang sangat berbahaya. Sejauh ini belum ditemukan vaksin atau obatnya, walaupun virus corona ini merenggut jutaan nyawa di dunia.

## E. Penelitian Terdahulu

Table 1 :

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Mario Walean Florence D. J. Lengkong Very Y. Londa	Implementasi Kebijakan Penanganan COVID-19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	2020	Implementasi Kebijakan Penanganan COVID 19 di di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dari aspek lingkungan sosial memberikan dampak yang baik pada kehidupan keluarga (lebih banyak waktu bersama keluarga) dan adanya pola hidup sehat. Dan adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang secara ekonomi diakibatkan oleh kenaikan harga bahan pokok dan kekurangan stock yang tidak diantisipasi oleh pemerintah di awal implementasi



				kebijakan terjadi peningkatan kebutuhan hidup keluarga.
--	--	--	--	---

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah hubungan atau keterkaitan antara suatu konsep dengan konsep lain dari masalah yang akan dipelajari. Kerangka konseptual berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara rinci topik yang akan dibahas. Menurut ( Sugiyono, 2014) adalah hubungan yang secara teoritis berhubungan antara variabel penelitian, yaitu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 yang menjadi fokus penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif. Untuk mendukung penelitian ini ,maka peneliti menggunakan teori-teori L Weimer dan Aidan R. Vinning dan Edward III dalam (Subarsono (2010) dan Gow dan Morss (dalam Pasolong, 2013). Dianggap sangat cocok untuk mendukung dan mengatasi permasalahan COVID-19 di Desa Buntu Buda.

## Kerangka Konseptual



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Made Winartha (2006:155) dikutip dari (Prabowo & Heriyanto, 2013)

*“Metode deskripsi kualitatif adalah metode analisis yang menganalisis, menggambarkan, dan merangkum berbagai kondisi dan situasi dalam berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi, dan mengamati masalah penelitian yang terjadi di lapangan.”*

Sementara itu Burhan, (2011) mengemukakan bahwa deskripsi penelitian adalah

*“Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian.”*

Pendekatan ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan agar memperoleh informasi yang jelas mengenai masalah dalam penelitian yang akan dibahas. Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah, pertama menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini terbaik di bidang kajiannya, kedua peneliti menggunakan metode penelitian ini karena sifat dari masalah yang akan diteliti. Pertimbangan lain menggunakan pendekatan ini adalah permasalahan dan fakta yang ditemukan akan lebih tepat menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, bukan hitungan

matematis, sehingga hasil penelitian tentang suatu fenomena yang diharapkan dapat terungkap secara jelas dan mendalam.

## **B. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi yang akurat, lengkap dan bertanggung jawab terkait dengan pertanyaan dan pembahasan, penulis melakukan serangkaian penelitian dengan memilih lokasi penelitian di wilayah desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa. Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan di kantor desa Buntu Buda di Kabupaten Mamasa. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan kemampuan Kantor Desa Buntu Buda dalam menyelesaikan dan meminimalisir jumlah pasien COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Data Primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap karya tulis yang berhubungan dengan kasus Implementasi Kebijakan penanggulangan COVID 19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa data instansi Pemerintah Desa yang relevan dengan materi

penelitian yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **D. Informan**

Informan yang terlibat dalam pengumpulan informasi adalah pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi lokasi penelitian dan implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa. Informan penelitian meliputi:

1. Kepala Desa Buntu Buda
2. Sekretaris Desa Buda Buda
3. SATGAS COVID-19 Desa Buntu Buda
4. Kepala Puskesmas
5. Dokter Puskesmas
6. Perawat Puskesmas
7. Masyarakat Desa Buntu Buda
8. Masyarakat dusun Kampung Baru
9. Masyarakat Dusun Randanan
10. Masyarakat Dusun Makau
11. Masyarakat Dusun Lope

Ada 11 orang dalam dalam proses survei, dan mereka menjawab pertanyaan selama survei.



## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Ini adalah cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. wawancara, yaitu peneliti mengadakan pertemuan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan data tentang masalah yang dibahas dalam proposal ini.
2. Observasi, peneliti meninjau langsung ke lokasi penelitian untuk membandingkan teori dan fakta penelitian di lapangan.
3. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan erat dengan proposal ini..

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu peneliti langsung ke lokasi untuk mendapatkan data dari awal sampai akhir penelitian, kemudian secara sistematis dan logis mengolah data yang diperoleh untuk menggambarkan keaslian dari penelitian tersebut. situasi. Artinya, kesimpulan yang ditarik dari objek penelitian dan informan penelitian.

### **1. Reduksi data**

Reduce data, yaitu memilih subjek dari data hasil yang diperoleh peneliti, dan fokus pada fokus penelitian. Oleh karena itu, pengurangan data akan memberikan data yang jelas dan akurat tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.

## 2. Penyajian data

Setelah data terkumpul, peneliti mendeskripsikan data dalam deskripsi sehingga peneliti dapat lebih mudah menjelaskan isi penelitian dan menarik kesimpulan.

## 3. Menarik kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi yaitu peneliti menguraikan proses implementasi kebijakan COVID-19 di desa Buntubuda.

### **G. Teknik Keabsahan Data**

Selain membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, pengujian keabsahan data juga merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari sistem pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data perlu diuji untuk membuktikan keaslian data yang diperoleh selama proses penelitian. Berikut ini adalah uji validitas data kualitatif Triangulasi dalam uji kredibilitas meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknis dan triangulasi waktu.

#### 1. Triangulasi

Pengujian kepercayaan didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, ada triangulasi sumber, triangulasi teknologi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber

untuk menguji kredibilitas data, yang diperoleh dengan memeriksa berbagai sumber yang diwawancarai oleh peneliti, kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mencapai kesimpulan bahwa “Desa Buntu Buda menerapkan

kebijakan penanggulangan COVID-19”. Pengumpulan dan pengujian data dilakukan terhadap aparat pemerintah desa, pihak kontraktor puskesmas, SATGAS desa, dan masyarakat desa dan desa kecil (informan). Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, diklasifikasikan menggunakan pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan mana dari ketiga sumber data tersebut yang spesifik.

b. Triangulasi Teknik

Digunakan untuk menguji kredibilitas data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda (yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi).

c. Trigulasi waktu

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang memiliki waktu penelitian yang berbeda saat mewawancarai setiap nara sumber.

2. Credibility (Kredibilitas)

Melakukan uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data penelitian yang diberikan oleh peneliti agar hasil penelitian tersebut tidak dicurigai sebagai karya ilmiah.

### 3. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga pengujian konfirmasi penelitian. Jika hasil penelitian tersebut diakui oleh lebih banyak orang, maka penelitian tersebut dapat dikatakan objektif. Pengujian konfirmabilitas penelitian kualitatif berarti menguji hasil penelitian terkait dengan proses yang dijalankan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi kriteria konfirmabilitas.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### a. Gambaran Umum

Desa Buntu Buda adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Desa Buntu Buda didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 yang meliputi pembentukan desa baru hasil pemekaran desa di Kabupaten Mamasa. Desa Buntu Buda beriklim tropis lembab dengan suhu rata-rata 19 derajat Celcius dan kecepatan angin 77-85 km/jam. Desa berpenduduk 2.491 jiwa ini terdiri dari empat desa kecil, yaitu Kampung Bahru, Randanan, Lope dan Desa kecil Makau. Visi dan misi Desa Buntu Buda.

Visi dan misi tersebut memuat gambaran umum keadaan desa yang ideal pada akhir masa perencanaan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Buntu Buda 2017-2023 adalah visi kepala desa terpilih. Visi dan misi adalah:

Visi:

Mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik dan transparan serta menuju kehidupan masyarakat desa yang sejahtera dan berbudaya.

Misi:

- a. Pembangunan infrastruktur desa secara merata
- b. Memaksimalkan fungsi kantor desa sebagai pusat pelayanan masyarakat
- c. Pemberdayaan perangkat desa, para kepala dusun

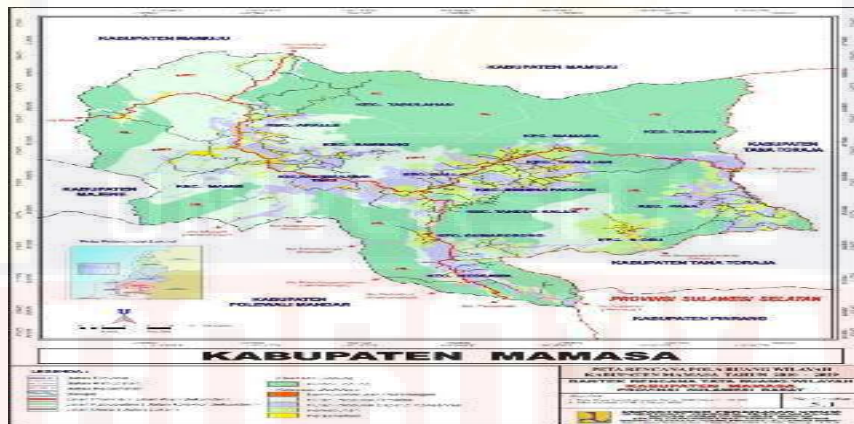
- d. Tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel
- e. Pelaksanaan program tepat sasaran
- f. Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa (BUMD)
- g. Membantu peningkatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian ekonomi masyarakat
- h. Memberi peran kepada tokoh-tokoh masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- i. Pemberdayaan tim PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).
- j. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa

#### **b. Sejarah singkat Desa Buntu Buda**

Desa Buntu Buda berdiri pada awal tahun 2003. Peraturan Daerah Nomor 1 (PERDA) dikeluarkan pada tahun 2003 tentang pemekaran desa dan pembentukan desa baru di Kabupaten Mamasa. Desa Buntu Buda pada tahun 2021 berpenduduk 2.491 jiwa dan terdiri dari 4 desa kecil. Desa Buntu Buda dipilih sebagai nama desa karena terletak di tengah-tengah kecamatan Mamasa. Kepala desa pertama bernama Thomas Dessu dan menjabat dari tahun 2003 hingga 2007. Masyarakat pedesaan Buntu Buda sebagian besar merupakan masyarakat asli Mamasa yang telah hidup jauh sebelum pemekaran kabupaten Mamasa. Sebelum pemekaran Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa merupakan wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2002. UU Nomor Tahun 2002 menetapkan pembentukan Kabupaten

Mamasa dan Palo di Provinsi Sulawesi Selatan. bagian dari pemekaran Kabupaten Mamasa. Pada tahun 2002 Kabupaten Mamasa resmi menjadi salah satu wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan semboyan Mesa Kada dari Potuo Buda Kada di Pomate.

**Gambar 1. 3** Letak Geografis Kabupaten Mamasa



Sumber: (<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWA>)

Setelah pembentukan Kabupaten Mamasa, kepala daerah pertama adalah Said Sagaf, yang menjabat sebagai pemerintah daerah dari tahun 2003 hingga 2008. Setelah Kabupaten Mamasa diubah menjadi Kabupaten Mamasa pada 18 September 2008, Sagaf digantikan oleh Obed Nego Depparinding sebagai penanggung jawab pada 18 September 2013, dan Ramlan Badawi digantikan oleh Kabupaten Mamasa pada September 2013. wilayah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk wilayah ini adalah 163.383, dimana 83.928 adalah laki-laki dan 79.455 adalah perempuan. Distrik ini dibagi menjadi 17 jalan dan 181

desa. Penduduk asli kabupaten Mamasa adalah suku Mamasa yang merupakan sub suku Toraja.

**c. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa**

Struktur organisasi berfungsi sebagai proses pengambilan keputusan untuk memilih kerangka kerja alternatif, item pekerjaan, dan departemen. Oleh karena itu, keputusan atau tindakan yang dipilih akan menghasilkan struktur organisasi Ivancevich (2008) dan Mullins (1993) dikutip dari Effendhie, (2011) mendefinisikan struktur organisasi sebagai pekerjaan dan tanggung jawab, aturan dan hubungan kerja, dan saluran komunikasi. Pembentukan struktur organisasi dapat membagi pekerjaan di antara anggota organisasi dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan, sehingga membimbing seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi struktur organisasi merupakan badan utama, menggambarkan kedudukan dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan dalam organisasi



## **B. HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini berisi tentang hasil Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Bantu Buda Kabupaten Mamasa, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 melibatkan serangkaian pelaksanaan untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19. Berikut adalah hasil penelitiannya.

### **a. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda**

Penelitian ini berisi tentang hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Penanggulangan COVID-19. Untuk lebih memahami Pelaksanaan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi, mengamati kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan teori dengan fakta. Peneliti kemudian melakukan wawancara untuk menjawab pertanyaan tentang Pelaksanaan Kebijakan COVID-19 di Desa Buntu Buda. Dalam menjawab bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan Penanggulangan COVID-19.

Sosialisasi keliling merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa selama proses implementasi, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat desa untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Untuk lebih memahami kegiatan Sosialisasi keliling, peneliti mewawancarai kepala desa Desa Bantu Buda. Adapun pernyataan informan itu adalah :

*“Program sosialisasi keliling ini bertujuan untuk menjangkau seluruh wilayah desa, dan kami berharap dengan dilaksanakannya program ini, masyarakat akan mematuhi kebijakan COVID-19 di desa Buntu Buda,”* (Melianus 25 Juni 2021).

Dari hasil wawancara tentang pelaksanaan sosialisasi keliling COVID-19 di Desa Buntu, Buda. Melianus menjelaskan dalam keterangannya selaku kepala desa bahwa pelaksanaan program sosialisasi keliling dilakukan secara merata di seluruh wilayah dan memungkinkan masyarakat mematuhi kebijakan protokol kesehatan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan sekretaris desa untuk memperjelas pelaksanaan sosialisasi keliling. Adapun pernyataan informan:

*“Sosialisasi keliling dilaksanakan untuk mendorong warga desa agar selalu mematuhi 3M dan tidak menimbulkan keramaian dari masyarakat desa selama COVID-19”* (Johnson S.Pd, 24 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan, sekretaris desa, menghasilkan pernyataan yang sesuai dengan pernyataan kepala desa yang menyatakan bahwa tujuan penerapan sosialisasi keliling dalam kebijakan COVID-19 di desa Buntu Buda adalah untuk mencegah dan mengatasi virus COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan .

Untuk memperjelas hasil wawancara, peneliti kemudian mewawancarai seorang anggota SATGAS COVID-19 di desa Buntu Buda, dan membandingkan pernyataan dua informan pertama dengan pernyataan SATGAS yang melakukan sosialisasi sosial keliling di desa tersebut. Informan menyatakan.

*“Pelaksanaan sosialisasi keliling desa terkait 3M dalam Protiokol Kesehatan (PROKES) dilakukan secara menyeluruh dari desa hingga ke dusun kecil.*

*Karena kondisi geografis setempat yang kurang mendukung, maka pelaksanaan sosialisasi keliling sering terhambat dengan masuk ke dusun-dusun ” (Dr Fitria S. Kep. Ns, Senin, 28 Juni 2021).*

Peneliti menemukan dari hasil wawancara narasumber bahwa sosialisasi keliling dilakukan secara merata di setiap desa kecil yang ada di desa, namun dalam pelaksanaannya terkendala oleh jalannya jalan dusun dan tidak mendukung proses sosialisasi. Apa yang terjadi di lapangan masih jauh dari tujuan kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan sosialisasi keliling menemui banyak kendala dalam proses pelaksanaan di lapangan, seperti kendala akses jalan pedesaan.

Pengamatan peneliti menemukan bahwa program sosial keliling telah dilaksanakan di semua desa dan dusun, dan masih banyak masyarakat desa yang tidak mematuhi prosedur COVID-19 dalam desa.

Untuk memahami alasan mengapa sebagian masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang disosialisasikan melalui kebijakan COVID-19, peneliti mewawancarai seorang informan dari masyarakat desa Buntu Buda. Informan menyatakan.

*“Alasan sebagian masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan karena sebagian masyarakat menganggap COVID-19 hanya penyakit biasa, dan*

*sebagian masyarakat menganggap COVID-19 hanya tipuan pemerintah, sehingga sebagian masyarakat sudah tidak peduli lagi, itupun selalu disosialisasikan.” (Pdt. Marsono S.Th 9 Juli 2021).*

Menurut hasil wawancara di atas, informan mengatakan bahwa alasan sebagian masyarakat desa tidak mematuhi peraturan kesehatan melalui sosialisasi keliling adalah karena orang berpikir bahwa COVID-19 hanyalah penyakit biasa, dan mereka yang menganggap bahwa COVID-19 hanyalah tipuan pemerintah.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyebab ketidaktaatan sebagian orang disebabkan oleh perbedaan karakteristik dan persepsi terhadap pandemi COVID-19.

Setelah memahami pandangan tentang manfaat dan masalah penerapan jejaring sosial seluler. Peneliti melanjutkan wawancara dengan perwakilan dari masing-masing dusn. Wawancara pertama dilakukan di Dusun Kampung Baru. Adapun pernyataan informan.

*“Manfaatnya bagi warga desa adalah memahami cara pencegahan COVID-19. Penerapan sosialisasi keliling di Dusun Kampung Baru tidak ada masalah. (Imanuel Tato Podo S.E, 30 Juni 2021).*

Menurut hasil wawancara dengan informan dari Dusun Kampung Baru di Desa Buntu Buda mengatakan bahwa manfaat dari sosialisasi keliling di dusun Kampung Baru adalah masyarakat di dusun tersebut memahami cara pencegahan COVID-19 dan tidak ada masalah dengan penerapan sosialisasi kelling. Setelah

mewawancarai informan di Dusun Kampung Baru, peneliti mewawancarai informan di Dusun Rannan, informan mengatakan:

*“Manfaat sosialisasi keliling khususnya di dusun Randanan, masyarakat selalu memakai masker saat keluar rumah, namun sebagian warga masih melanggar kebijakan”* ( Yansen PS.T, Rabu, 30 Juni 2021).

Dilihat dari hasil wawancara dengan informan Dusun Randanan, manfaat sosialisasi keliling khususnya Dusun Randanan, masyarakat Dusun selalu memakai masker saat keluar rumah. Dilihat dari wawancara di atas, permasalahan yang muncul sama dengan permasalahan yang diungkapkan oleh informan COVID-19 di Desa Bantu yaitu permasalahan ketidakpatuhan sebagian masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Berikut wawancara dengan seorang informan dari dusun di Makau.

*“Membuat warga patuh, selalu pakai masker dan cuci tangan.”* (Ahmad Mayuddin, 10 Juli 2021).

Hasil wawancara dari narasumber tersebut di atas menunjukkan bahwa dari penerapan sosialisasi keliling masyarakat menjadi patuh dan selalu memakai masker. Hasil wawancara di atas merupakan wawancara singkat, karena informan yang ingin melaksanakan sholat ahad dan hanya bisa menjawab secara singkat pertanyaan peneliti. Selanjutnya informan terakhir di Desa Lope. menyatakan

*“Sosialisasi keliling membuat masyarakat menerapkan 3M seperti memakai masker dan mencuci tangan untuk mencegah virus COVID-19, kendala di dusun Lope adalah jalan yang sulit untuk mobil masuk, karena jalannya menanjak. dan terkadang berlumpur saat hujan”* (Nixen S.Pd 10 Juli 2021).

Dilihat dari hasil wawancara dengan informan dari dusun Lope, informan mengatakan bahwa sosialisasi keliling adalah masyarakat peduli terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 di desa, dan kendalanya adalah jalan menuju desa yang sulit diakses.

Pengadaan sarana cuci tangan ini merupakan langkah kedua dari langkah pemerintah desa Buntu Buda dalam menangani COVID-19 di desa Buntu Buda. Untuk memahami secara akurat tujuan pembelian fasilitas cuci tangan, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan.

Untuk mengetahui tujuan pembelian tempat pencucian tangan, peneliti mewawancarai kepala desa Buntu Buda tentang tujuan pembelian sarana.

Informan menyatakan .

*“Fasilitas cuci tangan dan fasilitas lainnya dirancang untuk memungkinkan warga di pasar mencuci tangan di fasilitas cuci tangan yang disediakan untuk mencegah penyebaran COVID-19” (Melianus 25 Juni 2021).*

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Buntu Buda, mengenai tujuan pembelian tempat cuci tangan, tujuan pembelian dan pendirian tempat cuci tangan di semua tempat umum yang ada di desa adalah untuk memungkinkan masyarakat yang ada di tempat-tempat umum seperti dapat mencuci tangan di tempat cuci tangan untuk mencegah penyebaran COVID -19.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, peneliti mewawancarai dokter di Puskesmas Mamasa untuk mendapatkan hasil yang akurat. kata sumber itu.

*“Sangat dianjurkan untuk mencuci tangan di masa pandemi untuk mencegah virus COVID-19. Saat mencuci, sangat disarankan menggunakan sabun*

*sebagai antibakteri untuk membersihkan tangan dari virus corona.”* (Dr. Hajai S Tangga M. Kes, 31 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan menyatakan bahwa sangat dianjurkan untuk mencuci tangan untuk mencegah virus COVID-19 dan menggunakan sabun sebagai antibakteri untuk mencuci tangan. Setelah memahami tujuan tempat pencucian tangan dan cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah COVID-19, peneliti kembali mewawancarai masyarakat desa dan masyarakat dusun tentang pengadaan sarana pencucian tangan.

*“Dengan penyediaan fasilitas cuci tangan di tempat umum, kita pun tetap bisa mencuci tangan di luar rumah seperti ketika di pasar kita bisa cuci tangan untuk menghindari penyebaran COVID-19”* (Pdt Marsono S.Th 9 Juli 2021)

Dari hasil wawancara dengan informan, penyediaan fasilitas cuci tangan di tempat umum, kita bisa cuci tangan seperti di pasar walaupun sedang di luar. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan warga di beberapa dusun untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dusun tersebut. Dalam proses mewawancarai warga dusun, peneliti terlebih dahulu mewawancarai informan dari dusun Kampung Baru. Menyatakan :

*“Pembuatan dan penempatan tempat cuci tangan memungkinkan masyarakat untuk bisa mencuci tangan, di tempat umum, cara pencegahan COVID-19”* (Imanuel Tato Podo S.E, 30 Juni 2021).

Dari hasil wawancara narasumber, dari pelaksanaan pengadaan cuci tangan adalah warga dapat mencuci tangan meski di tempat umum. Informan kedua dari Desa Randanan Menyatakan :

*“Dengan mendirikan tempat cuci tangan di tempat umum, masyarakat bisa mencuci tangan untuk mencegah COVID-19,”* (Yansen P S. T, 30 Juni 2021).

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian, peneliti menemukan bahwa kebijakan penyediaan fasilitas cuci tangan memungkinkan masyarakat untuk mencuci tangan sekaligus mencegah COVID-19. Informan ketiga berasal dari dusun di Makau. Informan menyatakan:

*“Fasilitas cuci tangan sangat membantu masyarakat karena bisa cuci tangan sambil belanja di pasar”* (Ahmad mahyudin 10 Juli 2021)

Dari hasil wawancara informan, kegiatan penyediaan sarana cuci tangan sangat membantu masyarakat karena dapat mencuci tangan di tempat umum. Informan keempat adalah perwakilan masyarakat dari Dusun Lope yang mengatakan:

*“Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa untuk mencegah penyebaran COVID-19 sangat tepat dengan cara memberikan pelayanan cuci tangan bagi masyarakat yang berkegiatan di keluar rumah.”* (Nixen S.Pd 10 Juli 2021)

Wawancara dengan informan yang menunjukkan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk mencegah penyebaran COVID-19 sangat tepat, karena masyarakat dapat mencuci tangan untuk di luar rumah.

Penyemprotan disinfektan merupakan rencana terakhir Pemerintah Desa Buda. Penyemprotan disinfektan bertujuan untuk membunuh virus yang menempel pada benda dan virus corona di udara.

Dalam proses mempelajari dan menganalisis kegiatan penyemprotan disinfektan, untuk mendapatkan hasil yang akurat dan sesuai dengan kondisi



setempat yang sebenarnya. Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi untuk mengamati proses penyemprotan disinfektan di desa tersebut. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa semua jalan desa dan jalan-jalan dusun, rumah penduduk, pasar, gereja dan tempat-tempat lain yang sering ramai telah disemprot dengan disinfektan. Adapun wawancara dengan informan yaitu kepala desa menyatakan.

*“Tujuan penyemprotan disinfektan adalah untuk mematikan virus corona di jalan-jalan pedesaan, barang-barang pasar, dan rumah-rumah penduduk.”*  
(Melianus, 25 Juni 2021).

Dilihat dari hasil wawancara dengan kepala desa, tujuan penyemprotan disinfektan adalah untuk mematikan virus corona di udara dan benda-benda di tempat umum. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini, peneliti melakukan beberapa wawancara dengan seorang informan dusun yang bertugas sebagai relawan COVID-19 di lapangan . Adapun pernyataan informan.

*“Pelaksanaan kegiatan penyemprotan disinfektan kami mengalami kendala pada fasilitas APD. Diantaranya, jumlah APD yang digunakan untuk penyemprotan terbatas, sehingga kami mengganti APD dengan jas hujan.”*  
(Yansen P S. T Rabu, 30 Juni 2021).

Dari hasil wawancara informan yang merupakan relawan COVID-19 menjelaskan bahwa dalam proses penyemprotan disinfektan APD, disinfektan yang harus digunakan terbatas. Untuk menanggapi pernyataan peneliti melaksanakan wawancara dengan Kata kepala desa. Menyatakan.

*“Sebenarnya jumlah APD yang diberikan cukup banyak, namun sebagian besar APD tersebut digunakan oleh tim COVID-19 di Desa Buntu Buda yang bertugas di area karantina”* (Melianus, 25 Juni 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyebab hambatan alat pelindung diri adalah sebagian besar alat pelindung diri digunakan oleh SATGAS COVID-19 di lokasi isolasi untuk menangani warga desa di Desa Bantubuda yang positif COVID-19.

Dilihat dari hasil wawancara dan studi observasi pelaksanaan program sosialisasi keliling dalam kebijakan tanggap COVID-19, penyediaan sarana cuci tangan dan penyemprotan disinfektan, semua kegiatan memiliki manfaat seperti terselenggaranya sosialisasi keliling. Di luar rumah, masyarakat dapat mencuci tangan di setiap tempat umum dan mengurangi jumlah virus corona dengan menyemprotkan disinfektan di jalan dan rumah warga. Kendalanya adalah jalan menuju desa-desa kecil yang buruk, dan minimnya alat pelindung diri.

Untuk menganalisis dan menguji penelitian terkait implementasi kebijakan COVID-19. Peneliti menggunakan indikator dalam teori Keberhasilan Implementasi dari David L Weimer dan Aidan R. Vinning.

### **1. Logika Kebijakan**

Logika kebijakan dimaksudkan untuk membuat penerapan kebijakan itu masuk akal, dengan dukungan teoretis. Mengenai indikator logika kebijakan untuk perumusan kebijakan, kebijakan tersebut harus terlebih dahulu mempertimbangkan manfaat dari kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, kebijakan COVID-19 dirumuskan untuk mencegah penyebaran COVID-19. tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan model pencegahan yang menyediakan layanan yang berfokus pada protokol kesehatan, pengobatan

penyakit, dan perlindungan kelompok rentan (lansia). Menurut pengamatan peneliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk merespon COVID-19 dengan dana bantuan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal kebijakan dan dana bantuan dari pemerintah daerah. Pemerintah digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, seperti kegiatan sosialisasi, penyediaan fasilitas pencegahan COVID-19, dan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 di lingkungan desa. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Buda, peneliti mengatakan:

*“Program dilaksanakan untuk melindungi masyarakat desa dari virus COVID-19 karena itu dikatan masuk akal ” (Melianus 25 Juni 2021)*

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan respon Desa Buntu Buda terhadap kebijakan mitigasi COVID-19 merupakan kebijakan yang wajar karena kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mencegah dan menanggulangi COVID -19 virus di desa Menyebar. Oleh karena itu, melalui rencana ini, masyarakat desa akan terlindungi dari virus COVID-19.

Kemudian, melalui pernyataan, saya mewawancarai kepala Puskesmas Mamasa

*“Kebijakan desa yang dilaksanakan masuk akal karena berdasarkan PERMENKES yang diteruskan ke desa untuk melaksanakan kebijakan COVID-19” (Dr. Yusuf S. Kep. Ns 28 Juni 2021).*

Dari keterangan di atas, informan menyatakan bahwa kegiatan tersebut dibenarkan karena berdasarkan PERMENKES (Kementerian Kesehatan) untuk melaksanakan kebijakan COVID-19.

Berdasarkan analisis data penelitian yang diperoleh informan, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan tanggap COVID-19 merupakan kebijakan yang wajar karena didasarkan pada pencegahan dan pengendalian COVID-19.

## **2. Lingkungan kebijakan**

Kebijakan tersebut telah berhasil diterapkan di suatu daerah, namun pada kenyataannya belum diterapkan di daerah lain, hal ini dikarenakan setiap lingkungan memiliki sikap yang berbeda terhadap kebijakan yang akan diterapkan di lingkungan tersebut. Dari hasil pantauan lingkungan Desa Buda Buntu, sebagian besar masyarakat tidak mengikuti kebijakan tersebut dengan berbagai alasan meskipun telah disosialisasikan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, peneliti mewawancarai kepala desa tentang apakah lingkungan desa menerima dan mematuhi kebijakan tanggap COVID-19.

*“Memang di sini sangat sulit karena komunitas khusus di desa kami memiliki berbagai pemikiran tentang COVID-19” (Melianus, 25 Juni 2021).*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketika pemerintah desa menerapkan kebijakan tanggap COVID-19 di Desa Buntu Buda, lingkungan kebijakan dalam bidang kehidupan masyarakat masih sulit untuk menerima dan mematuhi kebijakan tersebut. Pemikiran tentang COVID-19. Namun, pernyataan

orang dalam tersebut di atas berbeda dengan pernyataan seorang warga desa yang diwawancarai oleh penyidik, yang menyatakan:

*“Alasan masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah desa adalah untuk mensosialisasikan dan tidak mengawasi masyarakat” (Nexen 12 Juni 2021).*

Pernyataan pelapor tersebut di atas menyatakan bahwa masyarakat desa tidak mematuhi kebijakan tersebut karena kurangnya pengawasan dari pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pernyataan pelapor bertentangan dengan pernyataan kepala desa tentang lingkungan kebijakan. Jadi kesimpulan peneliti tentang analisis indikator lingkungan kebijakan untuk mengukur keberhasilan langkah kebijakan, karena karakteristik dan sikap desa, dan kurangnya karakteristik dan sikap desa, kebijakan belum diterima oleh semua desa dan belum dilaksanakan. Pengawasan oleh aparat desa dalam pelaksanaan kebijakan COVID-19.

### **3. Kemampuan Implementator**

Kemampuan pelaksana menjadi penggerak keberhasilan kebijakan, seperti kemampuan dan tingkat keterampilan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pada saat mengimplementasikan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda, kualitas dan keahlian instansi pemerintah desa bertanggungjawab atas keberhasilan implementasi COVID-19. Kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan. Dari hasil pantauan aparat desa yang melaksanakan kebijakan dengan kemampuan dan keahlian sehingga Desa Buntu Buda dapat

mengatasi COVID-19, dan pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai tujuan.

Berikut hasil wawancara dengan sejumlah orang dalam, kata kepala desa:

*“Pegawai-pegwai yang bekerja di melaksanakan kebijakan COVID-19 memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, karena pemilihan perangkat desa didasarkan pada keahliannya, kemudian ketika kita menempatkan mereka, seperti contoooh bendahara, kita akan memilih orang yang bergelar A.Md untuk mengurus pengarsipan berkas berkas ”.* (Melianus, 25 Juni 2021).

Dilihat dari hasil wawancara di atas, informan yang diwawancarai mengatakan bahwa dalam proses penempatan kerja, pemilihan pekerjaan didasarkan pada kemampuan untuk melakukan tugas. Informan selanjutnya berkata

*“Semua pegawai yang melaksanakan kebijakan tersebut memiliki keahlian sesuai dengan tugasnya masing-masing”* (Johnson S.Pd 24 Juni 2021).

Pernyataan informan sebagai sekretarais partai desa menyampaikan pernyataan yang sama dengan kepala desa tentang kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan berkeahlian sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Berikutnya adalah pernyataan informan,

*“Pelksana kebijakan dalam hal ini aparat desa dan SATGAS COVID-19 desa yang menjalankan kebijakan COVID-19 di desa tentu mumpunyai keahlian , karena mereka diseleksi sebelum bekerja dalam organisasi SATGAS COVID-19”* (Pdt Marsono S.Th 9 Juli 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan, aparat desa yang menjalankan kebijakan berkeahlian dalam melaksanakan pencegahan COVID-19.

**b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda**

Faktor adalah hal-hal yang menyebabkan sesuatu terjadi. Saat menerapkan kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda, kegiatan pelaksanaan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu melalui observasi, kemudian mewawancarai beberapa orang sebagai informan dalam desa Buntu Buda. Pertama peneliti mewawancarai Kepala Desa Buda, informan mengatakan:

*“Faktor pendukungnya adalah fasilitas cuci tangan, penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan SEMBAKO yang menggunakan dana desa dan bantuan pemerintah daerah bantuan ini diberikan kepada masyarakat desa melalui SATGAS COVID-19”*(Melianus 25 Juni 2021).

Dari wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa faktor yang mendukung implementasi kebijakan tersebut adalah pengadaan sarana cuci tangan, BLT dan pendistribusian sembako. Peneliti kemudian membandingkan pernyataan ini dengan informan lainnya selaku aparat desa, untuk mengklarifikasi lebih lanjut pernyataan di atas, informan menyampaikan.

*“Pengadaan dan penempatan sarana cuci tangan di desa, BLT dan SEMBAKO di masyarakat desa. Faktor penghambat protokol kesehatan sering dilanggar, masyarakat di desa ”* (Johnson S.Pd 24 Juni , 2021)

Hasil wawancara dengan peneliti dan orang dalam menunjukkan bahwa faktor yang mendukung adalah pengadaan penempatan sarana cuci tangan, bantuan BLT dan sembako. Pada saat yang sama, faktor penghambat menunjukkan bahwa masyarakat sering melanggar protokol kesehatan.

Menurut hasil wawancara ada banyak faktor yang mendukung dan menghambat lebih jauh untuk memperoleh hasil wawancara lebih akurat peneliti mewawancarai informan lainnya. informan mengatakan:

*“Pada masa pandemi ini, jumlah tenaga kesehatan terampil adalah pendukung utama berjalannya kebijakan, .Kendala sebagian dari masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dalam desa”*. (Dr. Fitria S. Kep. Ns 28 Juni 2021).

Wawancara dengan narasumber ditemukan bahwa faktor pendukungnya adalah jumlah tenaga kesehatan untuk program 3M di lingkungan desa, faktor penghambatnya adalah tidak patuhnya masyarakat terhadap PROKES (Protokol Kesehatan). Selanjutnya peneliti pindah lokasi ke Puskesmas Mamasa dan mewawancarai penanggung jawab Puskesmas dalam hal ini kepala puskesmas tentang faktor pendukung dan penghambat. informan berkata:

*“Faktor pendukung yaitu penyediaan fasilitas pencegahan COVID-19 dan jumlah tenaga kesehatan dalam pencegahan COVID-19 sangat mencukupi. Tenaga kesehatan yang ditunjuk adalah tenaga kesehatan yang memahami tata cara pencegahan dan penanganan COVID-19 khususnya di daerah ini. Desa Buntu Buda kendalanya adalah kesadaran masyarakat yang biasanya tidak mamatuhi PROKES (Protokol Kesehatan)”* (Dr. Yusuf S. Kep. Ns 11.55).



Hasil wawancara dengan informan dalam menunjukkan bahwa faktor pendukungnya adalah jumlah tenaga kesehatan yang cukup memahami prosedur pencegahan COVID-19, sedangkan faktor penghambatnya adalah kesadaran masyarakat yang sering tidak mematuhi prosedur kesehatan. Informan lebih banyak menyebutkan tentang jumlah dan keahlian tenaga kesehatan, karena menurutnya kebijakan pemerintah desa lebih banyak berbasis ilmu-ilmu kesehatan. Oleh karena itu, informan bahwa faktor pendukung yang paling penting adalah jumlah dan keahlian tenaga kesehatan. Untuk mengetahui hasil wawancara yang akurat, peneliti mewawancarai dokter yang bertugas di puskesmas dan menyampaikan informasi sebagai berikut:

*“Faktor dukungan yang mendukung tenaga ahli pelayanan pencegahan COVID-19 , Fasilitas cuci tangan yang ditempatkan di tempat-tempat yang banyak penduduknya. Kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat desa, yang sering mengabaikan PROKES (Protokol Kesehatan), untuk Misal masih sering kumpul dan tidak pakai masker.”* (Dr. Hajai S Tangga M. Kasus 31 Mei 2021).

Hasil wawancara narasumber terkait faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan COVID-19. Narasumber menyatakan faktor pendukung adalah tenaga kesehatan yang ahli dalam pelayanan pencegahan COVID-19,

dan fasilitas cuci tangan ditempatkan sesuai dengan sering terjadi kerumunan kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam kebijakan COVID-19.

Dilihat dari hasil wawancara di atas, Puskesmas memiliki argumen yang sama untuk faktor pendukung dan penghambat. Setelah itu, peneliti kembali ke desa dan mewawancarai informan dalam ddesa tersebut, beliau mengatakan:

*“Faktor-faktor yang mendukung kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui bahwa penyakit COVID-19 itu nyata. Kendala-kendalanya adalah sebagian besar masyarakat di desa sering tidak patuh, karena masyarakat yang bekerja seperti buruh tani mau tidak mau harus bekerja ke luar dan mengakitbatkan. ,ancaman penyebaran COVID-19 lebih besar.” (Pdt. Marsono S.Th 9 Juli 2021)*

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber menunjukkan bahwa faktor pendukung adalah pelaksanaan proyek sosialisasi keliling yang diawasi oleh pemerintah desa, sedangkan faktor penghambatnya adalah kesadaran masyarakat desa terhadap kepatuhan kebijakan. .

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung adalah jumlah tenaga kesehatan terampil, fasilitas cuci tangan, sedangkan faktor penghambatnya adalah kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Selanjutnya peneliti melakukan

wawancara terkait faktor pendukung dan penghambat di beberapa dusun untuk mendapatkan hasil yang akurat. Informan pertama adalah seorang warga dusun.

*“Faktor pendukungnya adalah program bantuan BLT, menyediakan cuci tangan di tempat umum, dan faktor penghambatnya adalah sebagian masyarakat tidak mematuhi kebijakan, seperti tidak memakai masker” (Imanuel Tato Podo SE, 30 Juni 2021) .*

Dari hasil wawancara, orang dalam mengatakan bahwa faktor pendukungnya adalah distribusi BLT dan tersedianya fasilitas cuci tangan di tempat umum, sedangkan kendalanya adalah sebagian masyarakat tidak memakai masker dan tidak mematuhi aturan kebersihan. dan mereka masih sering berkumpul.

Informan selanjutnya menyampaikannya.

*“Faktor pendukung kepatuhan masyarakat terhadap 3M adalah distribusi sembako, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi 3M” (Yansen P ST 30 Juni 2021) .*

Dari hasil wawancara yang diwawancarai mengatakan bahwa yang mendukung 3M adalah mereka yang taat pada 3M, dan pembagian sembako.

Penghalang adalah mereka yang tidak patuh. Informan selanjutnya berkata.

*“Faktor pendukungnya adalah larangan mengadakan acara-acara kemasyarakatan, seperti pernikahan atau kematian, penghambat SATGAS sering lambat menangani jika ada warga yang terjangkit COVID-19” (Ahmed Mayuddin, 10 Juli 2021).*

Dari hasil wawancara dengan informan, faktor pendukungnya adalah

larangan kegiatan yang menyebabkan kerumunan orang berkumpul, dan faktor penghambat SATGAS yang biasanya lambat menangani warga yang terjangkit COVID-19. Lebih lanjut orang dalam menyatakan.

*“Kendala implementasi kebijakan tersebut adalah tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar pendukung, fasilitas cuci tangan ditempatkan pada tempat yang tepat. , seperti di pasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan”* (Nixen S.Pd. 10 Juli 2021).

Dari hasil wawancara narasumber, faktor pendukung sarana cuci tangan ditempatkan pada tempat yang tepat, seperti kapel dan lapangan, dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kendalanya adalah tidak adanya sanksi yang diberikan bagi pelanggar protokol misalnya, terkadang masyarakat tidak memakai masker dan masih berkerumun yang kemudian melanggar kebijakan COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan COVID-19, peneliti menyimpulkan bahwa faktor pendukung tersebut adalah kesadaran masyarakat, fasilitas cuci tangan, dan jumlah tenaga kesehatan terampil untuk penanganan COVID- 19 dalam layanan COVID-19. Desa Buntu Buda dan Faktor penghambatnya adalah beberapa warga desa yang sering tidak mengikuti protokol kesehatan.

## **a. Faktor Pendukung**

### **1. Komunikasi (Communication)**

Dalam mengimplementasikan kebijakan, harus ada komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengukur dan menganalisis faktor-faktor pendukung terkait kesadaran masyarakat tersebut dan memperoleh data yang akurat, peneliti mewawancarai seorang penduduk desa. Berikut petikan wawancara dengan narasumber

*“Semua rencana kegiatan pencegahan COVID-19 dikomunikasikan dengan jelas dan merata di semua desa dan dusun”* (Nixen, 10 Juli 2021).

Hasil wawancara dengan seorang informan di atas mengungkapkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat terjalin dengan baik dibuktikan dengan pernyataan bahwa semua rencana penanggulangan COVID-19 dikomunikasikan dengan jelas dan merata di semua desa dan dusun.

Kemudian informan lebih lanjut menyatakan.

*“Komunikasi pemerintah desa pada masyarakat sangat jelas”* (Imanuel tato Podo S.E, 30 Juni 2021).

Hasil wawancara di atas secara jelas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda sudah diketahui masyarakat. Hal ini disebabkan konsistensi proses sosialisasi dari pelaksana kepada masyarakat desa.

Berdasarkan data penelitian dari beberapa narasumber diperoleh kesimpulan bahwa indikator komunikasi berperan besar dalam pelaksanaan kegiatan, dalam

hasil penelitian terdapat komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

## **2. Sumber daya (Recourses)**

Sumber daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena tanpa sumber daya yang mendukung, implementasi kebijakan tidak akan efektif. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya kebijakan harus relatif cukup dan pengetahuan profesional implementasi kebijakan harus dimiliki.

*“Kebijakan ini sangat dibantu sumber daya manusia kita, seperti tenaga kesehatan yang berkeahlian dalam melayani dan menangani*

*COVID- 19 di desa, serta alokasi dana pemerintah daerah dan pusat, memungkinkan kita untuk lebih efektif dalam melaksanakan rencana pedesaan” (Johnson S.Pd 26 Juni 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, membandingkan observasi penelitian yang dilakukan peneliti terhadap peneliti dan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari faktor sumber pendukung yaitu jumlah tenaga kesehatan dengan keahlian medis. dan jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakannya dalam rangka implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 sumber daya fasilitas fasilitas cuci tangan, serta dana pemerintah daerah dan pusat. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa untuk memahami kebijakan dan hasil wawancara.

*“Sumber daya yang sangat mendukung implementasi kebijakan kita di sini adalah sumber daya manusia, seperti jumlah tenaga kesehatan pelaksana pelayanan di masyarakat pedesaan” (Melianus, 25 Juni 2021).*

Dilihat dari hasil wawancara di atas, informan menyatakan dalam keterangannya bahwa faktor pendukung adalah sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan. Dari sejumlah besar wawancara dan observasi, peneliti mendukung penulis untuk menunjukkan bahwa sumber daya dalam faktor pendukung kebijakan merupakan komponen yang sangat penting, karena implementasi kebijakan tergantung pada pengadaan sumber daya yang mendukung proses implementasi kebijakan.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19, indikator sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur faktor pendukung adalah jumlah perangkat desa dan tenaga kesehatan yang berkeahlian untuk mendukung kebijakan penanggulangan COVID-19.

### **3. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan. Dimana hasil penelitian dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti menyatakan secara dasar bahwa faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 adalah masuk dalam indikator struktur birokrasi hal

ini disebabkan karena dalam menjalankan atau menerapkan kebijakan pemerintah desa sendiri yang menjadi pelaksana dalam program penanggulangan COVID-19 atau dengan kata lain pemerintah desa sebagai desa yang kemudian akan mengarahkan dusun lain sebagai rekan dalam dalam pelaksanaan kebijakan di wilayah dusun masing-masing. Menanggapi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 peneliti menemukan hasil bahwa implementasi kebijakan bersifat kompleks dimana adanya kerja sama pihak di Desa Buntu Buda dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan melalui wawancara dengan Kepala Desa menyampaikan

*“Seluruh program yang kami lakukan selalu kami komunikasikan kepada pemerintah daerah mamasa dan kepada kepala-kepala dusun desa untuk menghindari kesalah pahaman mengenai kegiatan kami”* (Melianus 25 Juni 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas maka secara garis besar faktor struktur birokrasi dapat membantu terselenggaranya Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam dan terjalannya koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga dengan melibatkan lembaga pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19.



## **b. Faktor Penghambat**

### **1. Sikap (Disposition or Attitude)**

Sikap dari implementator yang berkaitan bagaimana sikap implementator dalam mendukung suatu implementasi kebijakan seringkali implementor rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. Adapun wawancara dengan informan.

*“Petugas dalam melaksanakan kegiatan pencegahan COVID-19 di desa atau dusun kurang konsisten seperti tidak memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan sering berkerumun” ( Ahmad mahyudin 10 Juli 2021).*

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementator yang berada di Desa Buntu Buda maupun Implementaor yang ditugaskan untuk turun langsung ke lapangan tidak serius dan konsisten dalam melaksanakan kebijakan program Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda. Adapun wawancara dengan relawan SATGAS mengenai hal ini. informan menyatakan :

*“Alasan kami tidak melaksanakan kegiatan dengan kosisten itu karena kurangnya pengawasan dari kepala desa tidak bisa selalu mengawasi pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan” (Yatsen 30 Juni 2021).*

Dari hasil wawancara diatas dengan relawan COVID-19 menyatakan penyebab tidak kosisten itu karena kurangnya pengawasan dari kepala desa dan tidak selalu mengawasi pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan

disamping itu ketidak efisienan dari pelaksanaan kebijakan Penanggulangan COVID1-19 disebabkan pula dari kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat desa untuk mematuhi protokol kesehatan dan pimpinan dalam mempengaruhi kebijakan. dalam pelaksanaan kegiatan penyebab sebagian masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan adalah akibat tidak tegasnya pemerintah desa dalam memberikan sanksi bagi pelanggar

Jadi kesimpulan dari sejumlah indikator pendukung dan penghambat diatas adalah dalam pelaksanaan kegiatan terdapat komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat terdapat juga tenaga kesehatan yang berkeahlian untuk mendukung kebijakan penanggulangan COVID-19 yang berjumlah banyak serta melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam dan terjalannya koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga dengan melibatkan lembaga pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 adapun penyebab sebagian masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan adalah akibat tidak tegasnya pemerintah desa dalam memberikan sanksi bagi pelanggar.

## C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berikut hasil pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda berdasarkan hasil penelitian.

### a. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Desa Buntu Buda dalam menanggulangi COVID-19 telah melaksanakan sejumlah kegiatan penanggulangan COVID-19 dalam rangkai Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 seperti program Sosialisasi Keliling Desa mengenai cara mencegah dan menanggulangi COVID-19, Penyemprotan disinfektan di pemukiman warga dan jalanan desa, dan Pengadaan dan penempatan sarana pencucian tangan di seluruh lokasi umum dalam desa.berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 247, 2020) mengenai pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19).

#### 1. Logika Kebijakan

Pandangan Weimer Dan Vining (1999:396) dikutip dari (Kahar, 2012) bahwa Logika dari suatu kebijakan ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang diterapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis.

Sedangkan kebijakan Menurut James P.Lester Kebijakan adalah Sebuah proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas Pemerintah yang didisain untuk mengatasi masalah publik.

Untuk menganalisis hasil penelitian peneliti menggunakan teori Weimer Dan Vining (1999:396) dengan indikator logika kebijakan bahwa pelaksanaan kebijakan melalui sejumlah langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dengan sasaran lokasi umum dan pemukiman warga sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah melalui surat edaran COVID-19 yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan ekonomi, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dan pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum (Ningtias, 2014).

Dalam pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 peneliti memperoleh hasil bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah kebijakan masuk akal karena kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di desa sehingga dari program tersebut masyarakat desa akan terlindungi dari virus COVID-19.

## **2. Lingkungan Kebijakan**

Menurut dalam Subarsono pandangan Weimer Dan Vining (1999:396) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam Sebuah keberhasilan implemementasi kebijakan sangat ditentukan oleh lingkungannya (Ningtias, 2014). Lingkungan masyarakat wajib

untuk mendapatkan perlindungan kesehatan oleh pemerintah seperti yang dilaksanakan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem (Rahmawati, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan yang dilaksanakan memiliki manfaat bagi masyarakat meskipun belum sepenuhnya berjalan efektif namun kegiatan telah akurat dalam menanggulangi COVID-19. Sedangkan pada penelitian terdahulu Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa (2020). menyikapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa aktivitas masyarakat diminta untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, tidak berjabat tangan, tidak berkumpul menjalankan kegiatan dari rumah.

### **3. Kemampuan Implementator**

Menurut dalam Subarsono pandangan Weimer Dan Vining (1999:396) dikutip dari Ningtias, (2014) Kemampuan implementor keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. Sedangkan Menurut Robert Kreitner (2005:185) yang dimaksud dengan kemampuan adalah karakteristik stabil yang berkaitan dengan kemampuan maksimum fisik mental seseorang dikutip dari Sharp (2016).

Dari hasil observasi peneliti aparat desa dalam melaksanakan kebijakan secara terampil sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda. Implementasi Kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan sebuah kegiatan dilaksanakan oleh implementator yang yang berkeahlian sehingga mendukung tersebut akan berjalan dengan efektif.

Sedangkan penelitian terdahulu “Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” (2020) Penduduk desa sea tumpengan yang didomisnasi oleh profesi pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai swasta menunjukkan tingkat pemahaman dan pengalaman yang baik. hal inipun didukung dengan tingkat pendidikan penduduk yang sebagian besar berpendidikan sarjana dan SMA. Keadaan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia masyarakat desa tersedia dengan baik dalam pelaksanaan program.

**b. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda**

Pelaksanaan kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung. Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa faktor pendukung kesadaran masyarakat, sarana pencucian tangan, dan jumlah tenaga kesehatan yang berkeahlian untuk

pelayanan COVID-19 di Desa Buntu Buda. Sedangkan penghambat yaitu sebagian masyarakat desa yang sering tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

## **1. Faktor Pendukung**

### **a. Komunikasi (Communication)**

Menurut Edward III dalam Subarsono (2010) Komunikasi merupakan sarana untuk memperluas informasi, baik dari atas atau kebawah maupun dari bawah ke atas. Sedangkan Komunikasi merupakan proses pengalihan suatu maksud dari sumber kepada penerima, proses tersebut merupakan suatu seri aktivitas, rangkaian atau tahap-tahap yang memudahkan peralihan maksud tersebut dikutip dari Bitung, (2018). Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas.

Dari hasil observasi dan penelitian menunjukkan berdasarkan analisis data penelitian yang diperoleh dari beberapa informan menyimpulkan bahwa indikator komunikasi sangat berperan besar dalam pelaksanaan kegiatan tetapi dalam hasil penelitian komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa desa dengan masyarakat kurang baik karena adanya sikap tidak transparan dari pihak pemerintah desa sehingga masyarakat ragu dan lantas melanggar protokol kesehatan.

Dalam komunikasi yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda oleh aparat pemerintah desa

dalam memberikan informasi publik melalui komunikasi yang dilakukan dengan Sosialisasi keliling pada masyarakat oleh implementor.

Bentuk komunikasi yang dilakukan berjalan dengan efektif dimana pemberian informasi-informasi dilaksanakan secara langsung dari pemerintah desa dan memanfaatkan wartawan sebagai media untuk menyebarkan berita yang tersalurkan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan COVID-19 sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan informasi.

#### **b. Sumber Daya (Recoursess)**

Menurut Edward III Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bila sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia Bitung, (2018)

Dari hasil penelitian sumber daya yang mendukung dalam kebijakan adalah sumber daya manusia, Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kesehatan yang berjumlah banyak dan memiliki keahlian dalam proses pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Faktor ini menjadi salah satu pendukung pelaksanaan kebijakan. Petugas pun dapat tidak kewalahan dalam menjalankan tugas karena jumlah tenaga kesehatan berjumlah banyak jadi pelayanan dijalankan secara berganti dalam pelayanan dan pencegahan COVID-19.

Apabila mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Subarsono (2010) tentang sumber daya maka dalam hal ini implementasi kebijakan berjalan dengan baik karena



terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam mengimplmentasikan suatu kebijakan tersebut.

### **c. Struktur Birokrasi (Bureaucritic Structure)**

Struktur organisasi merupakan rangkaian hubungan koordinasi kesamping dengan badan-badan lainnya. Dalam struktur organisasi mahasiswa, terdapat Dewan yang berfungsi untuk mengawasi kinerja para anggotanya serta mewedahi beragam kebutuhan para anggota yang tidak masuk ke dalam struktur organisasi pengurus tersebut.

Struktur organisasi merupakan gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan vertikal dan horizontal suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Perubahan terhadap struktur organisasi merupakan jawaban dari berbagai tekanan baik internal maupun eksternal dikutip dari Nurlia, (2019) Pengertian struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan semua kegiatan pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, wewenang dan juga tanggung jawabnya. Berdasarkan dari pengertian struktur organisasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalahh gambaran kerangka atau susunan hubungan antara fungsi, bagian atau posisi dan juga menunjukkna hirarki organisasi atau stuktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab serta sistem pelaporan terhadap atasan.

Dari hasil penelitian Berdasarkan penjelasan diatas maka secara garis besar struktur birokrasi dapat membantu terselenggaranya Implementasi

Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda karena melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya dan terjalannya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait pelaksanaan kebijakan COVID-19.

Sedangkan penelitian terdahulu “Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” (2020). Keadaan ini didukung dengan terjalinya hubungan kerja yang baik antara pemerintah desa dengan pimpinan golongan agama.

## **2. Faktor Penghambat**

### **a. Sikap (Disposition or Attitude)**

Tingkah laku atau gerakan-gerakan yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya dengan lingkungan sosial interaksi tersebut terdapat proses saling merepon, saling mempengaruhi serta saling menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 dikutip dari Janeiro, (2018).

Dalam pelaksanaan kebijakan penyebab masyarakat tidak patuh adalah akibat tidak adanya sanksi yang diberikan oleh petugas dilapangan sikap ini menjadi salah satu ciri adanya sikap tidak bertanggung jawab petugas. solusi dari permasalahan ini harus adanya evaluasi kinerja dari pemerintah desa terhadap petugas agar petugas mengetahui apa saja kinerja yang harus diperbaiki dan apa saja kinerja yang harus ditingkatkan dalam hal ini adalah

bentuk pemberian sanksi yang harus diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Tidak adanya pemberian sanksi ini kemudian menyebabkan masyarakat desa sebagian tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah pada masa wabah COVID-19. Dalam memberikan sanksi petugas terkendala pada pembatasan jarak dimana kegiatan tidak boleh dilakukan secara saling berdekatan disini terjadi polemik dalam pelaksanaan pemberian sanksi kepada masyarakat untuk solusi maka pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak wartawan untuk membagikan informasi kepada masyarakat desa yang berada dalam dusun mengenai cara pencegahan dan penanggulangan COVID-19 .

Dari pembahasan diatas mengenai indikator pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 dapat disimpulkan bahwa Komunikasi yang dilaksanakan berjalan dengan efektif dimana pemberian informasi dilaksanakan secara langsung dan melalui media untuk menyebarkan berita. Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kesehatan yang berjumlah banyak dan memiliki keahlian sehingga pelayanan COVID-19 cepat pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan kebijakan terjalannya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait pelaksanaan kebijakan COVID-19 namun tidak adanya pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan kemudian menyebabkan masyarakat desa sebagian tidak mematuhi protokol kesehatan

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buda Kabupaten Mamasa maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda pemerintah desa melaksanakan kegiatan sosialisasi, pengadaan pencucian tangan, dan penyemprotan disinfektan dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 pelaksanaannya berjalan secara efektif dan bermanfaat dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 di Desa Buntu Buda.
2. Beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buda Buntu.
  1. Faktor pendukung  
Kesadaran Masyarakat desa dalam mencegah penularan COVID-19, Jumlah Tenaga Kesehatan , dan jumlah fasilitas penanggulangan COVID-19.
  2. Faktor Penghambat :  
Tidak patuhnya sebagian masyarakat untuk menerapkan 3M,

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tanggap COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa”, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19, harus didukung oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kebijakan dengan mematuhi kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Desa Bantubuda.
2. Pemeintah Desa seharusnya memberikan sangsi kepada masyarakat desa yang melanggar protokol kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo.
- Daerah, P., Mamasa, K., Anggaran, P., Dan, P., Daerah, B., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Mamasa, B. (2003). *Pemerintah kabupaten mamasa. 2000, 1999–2001*.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi ke 2. In *Gadjah Mada University Press*.
- Dwiyanto, A., Damanhuri, D., & Jawandi, R., YAVUZ, G., UUD 45, Rasul, I., Rogger, D., Williams, M., Tahir, A., Rohayatin, T., Subagyo, A., Setiawan, A., Lee, G., Kwak, Y. H., Subhan, A., Rohayatin, T., Dwiyanto, A., Huda, N., Osborne, D., Peter, P., ... Krina, L. L. (2017). Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual. *Australian Journal of Public Administration, August 2017*, 169.
- Effendhie, M. (2011). Pengantar Organisasi. *Organiasi Tata Laksana Dan Lembaga Kearsipan*, 1–90. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP420902-M1.pdf>
- Goldschlag, N., Kim, J. D., & Kristin, M. (2019). Implementasi Kebijakan : perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hanamunika, G., Sari, D. S., & Dai, R. M. (2021). IMPLEMENTASIKEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

*Responsive*, 3(3). <https://doi.org/10.24198/responsive.v3i3.31921>

Hasibuan, H., Yusnadi, & Purba, S. (2016). Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. *Pendidikan Dan Kepengawasan*, 3(2), 33–49.

<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID 19 DI DESA SEATUMPENGAN KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA. (2020). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 6(96).

Kadji, Y. (n.d.). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan*.

Kahar, F. (2012). Implementasi Keputusan Strategik (Suatu Studi di Universitas Negeri Makassar). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.125>

Kebijakan, A., Smartphone, P., Sma, D. I., & Weimer, D. L. (2020). *Analisis kebijakan penggunaan*. 208–212.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 247. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan No. 247 Tahun 2020 Tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*. 2019, 1–127.

Kusnadi, D., Fattah, N., Husaini, A., & Ruhenda, R. (2018). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penilaian Autentik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i1.1348>

Lambelanova, R. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI  
KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Sosiohumaniora*, 19(2).

<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12137>

Ningtias, I. F. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 Tahun 2012 Di*

*Naskah Publikasi Isnaini Fitria Ningtias.*

Nurlia. (2019). Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Pengukuran Kualitas

Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan Dengan Hasil Kerja).

*Meraja Journal*, 2(2).

Pineleng, K., Minahasa, K., & Londa, V. Y. (2020). Implementasi Kebijakan

Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten

Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(96), 66–73.

Prabowo, A., & Heriyanto. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book)

Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang [Analysis of the

Utilization of Electronic Books (E-Books) by Pemustaka at the SMA Negeri 1

Semarang Library]. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(2), 1–9.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/3123>

Pramadya, L. (2016). Implementasi Program Campus Social Responsibility Dinas

Sosial Kota Surabaya (Studi Pada Kegiatan Pendampingan Mahasiswa Asuh

Terhadap Anak PMKS). *Publika*.

Rahmawati, F. L. (2009). UUD 32 TAHUN 2009(PPLH). *PEMERINTAH*

*REPUBLIK INDONESIA*, 2(5), 255. ???

Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 1993, 15.



- Sharp, R., Yue, Y., Han, J., Han, G., Aita, G. M., Wu, Q., ALBERTINI, S., CARMO, L. F. DO, PRADO FILHO, L. G. DO, Costa, L. A. D. S., Fonseca, A. F., Pereira, F. V., Druzian, J. I., Khalil, H. P. S. A., Davoudpour, Y., Islam, N., Mustapha, A., Sudesh, K., Dungani, R., ... Rainey, T. J. (2016). Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. I No. 2 Juli 2016 | STIE YPN 33 ... *Carbohydrate Polymers*, 17(1), 1–13.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.12.050><http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.04.064><http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.05.028><http://xlink.rsc.org/?DOI=C6NR09494E><http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.12.064><http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.12.064>
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara
- Sore, Uddin B. dan Sobirin, Kebijakan Publik (Makassar: CV Sah Media, 2017), 122. ([https://books.google.co.id/books?id=N1RtDwAAQBAJ&pg=PA121&dq=pengertian+implementasi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjMq9f1\\_neAhVJfCsKHcInA6UQ6AEIMzAB#v=onepage&q=pengertian%20implementasi&f=false](https://books.google.co.id/books?id=N1RtDwAAQBAJ&pg=PA121&dq=pengertian+implementasi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjMq9f1_neAhVJfCsKHcInA6UQ6AEIMzAB#v=onepage&q=pengertian%20implementasi&f=false)), diakses pada tanggal 29 Desember 2018.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Supriyanto, U., Arenawati, A., & Cadith, J. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MILLENNIAL ENTREPRENEUR. *Jurnal Governansi*, 7(1). <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i1.3597>
- Tachjan. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. In *Bulletin of the Atomic*

*Scientists.*

Tumanan, Y. B., & Negara, A. (2017). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Parigi Moutong. *Katalogis*, 5(12).

UUD RI UU RI No. 28 Tahun. (2004). Presiden republik indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 1–5.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>

Wahab, & Solicin, A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. *Universitas Muhammadiyah Malang Press*.

**LAMPIRAN**



Lampiran 1 Matrix pengembangan instrumen penelitian

**I. Judul Penelitian:**

**Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda  
Kabupaten Mamasa**

**II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda

**III. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kebijakan dalam Kebijakan Penanggulangan penyebaran COVID 19 di Desa Buntu Buda.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.

**IV. Fokus Penelitian**

1. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda

## **V. Informan Penelitian**

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Kepala Puskesmas
4. Dokter Puskesmas
5. Perawat Puskesmas
6. Tim Gugus Relawan COVID-19
7. Masyarakat Desa Buntu Buda
8. Masyarakat Dusun Makau
9. Masyarakat Dusun Kampung Baru
10. Masyarakat Dusun Lope
11. Masyarakat Dusuhn Randanan

**Table 2 : Matrix Untuk Pengembangan Penelitian**

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bagaimanakah Pelaksanaan kebijakan dalam Kebijakan Penanggulangan penyebaran COVID 19 di Desa Buntu Buda ?	Pelaksanaan Kebijakan dalam Kebijakan Penanggulangan penyebaran COVID 19 di Desa Buntu Buda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logika Kebijakan</li> <li>2. Lingkungan Kebijakan</li> <li>3. Kemampuan Implementator</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Kepala Desa Buntu Buda ( Informan Kunci)</li> <li>2.Kepala Puskesmas Desa Buntu Buda (Informan Utama )</li> <li>3.Perwakilan Masyarakat ( Informan Tambahan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Wawancara</li> <li>2.Dokumentasi</li> <li>3.Observasi</li> </ol>
2	Apasaja Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penaggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda ?	Faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi</li> <li>2. Sumber Daya</li> <li>3. Struktur Birokrasi</li> <li>4. Sikap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Kepala Desa Buntu Buda ( Informan Kunci)</li> <li>2.Kepala Puskesmas Desa Buntu Buda (Informan Utama )</li> <li>3.Perwakilan Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Wawancara</li> <li>2.Dokumentasi</li> <li>3.Observasi</li> </ol>

				( Informan Tambahan)	
--	--	--	--	-------------------------	--



**Judul penelitian:**

**Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda  
Kabupaten Mamasa**

**I. Kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda  
Kabupaten Mamasa**

**Langkah-langkah Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19**

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda ?
2. Bagaimana bentuk Hambatan kebijakan pemerintah desa dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 ?
3. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 ?
4. Apakah kebijakan yang dilakukan masuk akal (Rasionable) ?
5. Bagaimana sikap lingkungan merespon kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda ?
6. Bagaimana kemampuan implementator dalam melaksanakan kebijakan ?

**II. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda**

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 ?



**Judul Penelitian:**

**Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa**

**1. Observasi Umum dan Lokasi Penelitian**

- a. Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa

**2. Pelaksanaan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa**

- a. Logika Kebijakan
- b. Lingkungan Kebijakan
- c. Kemampuan Implementator

**3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa**

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Struktur Birokrasi
- d. Sikap

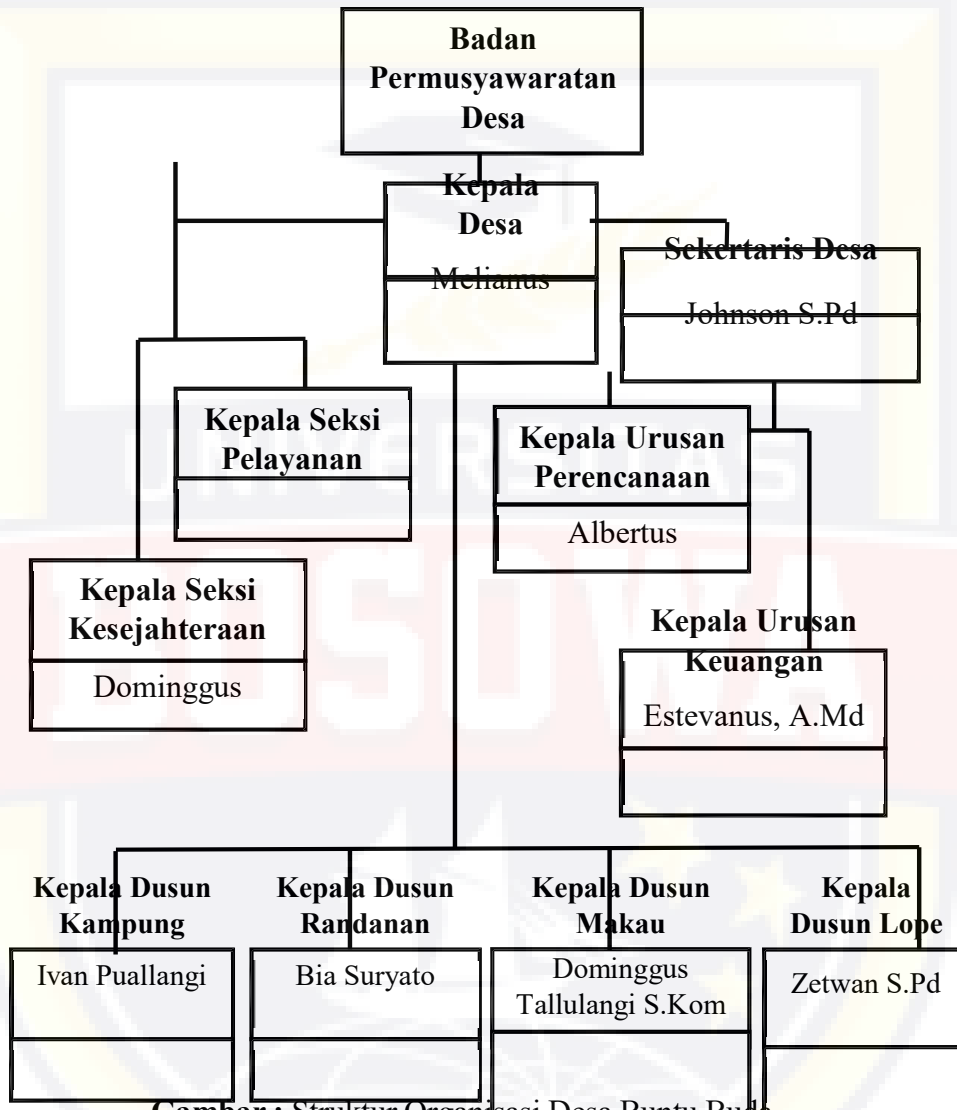
Lampiran 4 Nama dan asal informan

**TABLE 3**  
**DAFTAR NAMA DAN ASAL INFORMAN**

<b>No</b>	<b>Jabatan dan Asal Informan</b>	<b>Nama Informan</b>
1.	Kepala Desa Buntu Buda	Melianus
2.	Sekretaris Desa Buntu Buda	Johnson S.Pd
3.	SATGAS Desa Buntu Buda	Dr Fitria S.Kep Ns
4.	Kepala Puskesmas Desa Buntu Buda	Dr.Yusuf S.Kep Ns
5.	Dokter Puskesmas Desa Buntu Buda	Dr.Hajai S, Tangga M. Kes
6.	Perawat Puskesmas Desa Buntu Buda	Sri Haryati S.Kep Ns
7.	Masyarakat Desa Buntu Buda	Pdt Marsono S.Th
8.	Masyarakat Dusun Kampung Baru	Imanuel Tato Podo S.E
9.	Masyarakat Dusun Randanan	Yansen P S. T
10.	Masyarakat Dusun Makau	Ahmad Mahyudin
11.	Masyarakat Dusun Lope	Nixen S.Pd

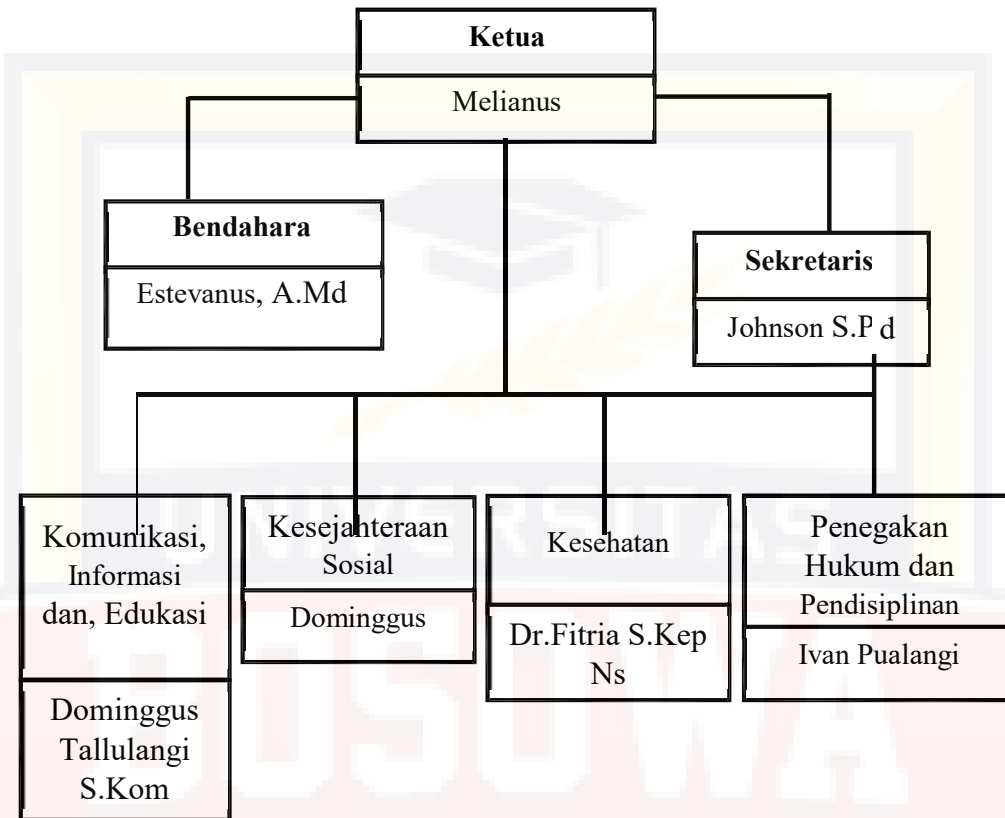
## Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa

### Kabupaten Mamasa



Gambar : Struktur Organisasi Desa Buntu Buda

### Struktur Organisasi SATGAS COVID-19 Desa Buntu Buda



**Gambar :** Struktur Organisasi SATGAS Desa Buntu Buda

**Lampiran I :Gambar Lokasi Penelitian dan Kegiatan Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda**



**Gambar 1. 4** Kantor Desa Buntu Buda sebagai lokasi penelitian terkait dengan Impelmentasi kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda



**Gambar 1. 5** Rapat program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda bersama anggota SATGAS COVID-19 Desa Buntu Buda untuk membahas mengenai lokasi Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19.



**Gambar 1. 6** Program sosialisasi keliling COVID-19 di Desa Buntu Buda dan sekitar dusun si desa dalam sosialisasi SATGAS COVID-19 untuk menghimbau kepada masyarakat agar selalu memtuhi protokol kesehatan dan melaksanakan 3M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan, dan menjaga jarak.



**Gambar 1. 7** Penempatan Sarana pencucian tangan di lapangan dengan maksud agar masyarakat ketika berada dilur rumah dapat selalu mencuci tangan untuk menghindari penularan COVID-19.



**Gambar 1. 8** Sarana pencucian tangan yang ditempatkan di rumah ibadah dengan tujuan agar masyarakat yang datang ke rumah ibadah dapat selalu mencuci tangan untuk menghindari penularan virus COVID-19.



**Gambar 1. 9** Sarana pencucian tangan yang ditempatkan di pasar dengan tujuan agar masyarakat yang datang untuk berbelanja tetap dapat mencuci tangan dalam rangka untuk mengurangi penularan COVID-19 di pasar.



**Gambar 1. 10** Penyemprotan disinfektan di salah satu rumah warga desa Buntu Buda untuk mematikan virus COVID-19 yang ada dan tertinggal di benda-benda dalam rumah

**BOSOWA**



## Lampiran II : Informan Penelitian



**Gambar 1. 11** Melianus selaku kepala desa dan informan penelitian setelah melaksanakan proses wawancara kepada informan yang dilaksanakan pada hari Jumat 25 Juni 2021 bertempat di Kantor Desa untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.



**Gambar 1. 12** Dr. Hajai S Tangga selaku Dokter Puskesmas Mamasa dan informan penelitian setelah melaksanakan proses wawancara kepada informan yang dilaksanakan pada hari Selasa 31 Mei 2021 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan



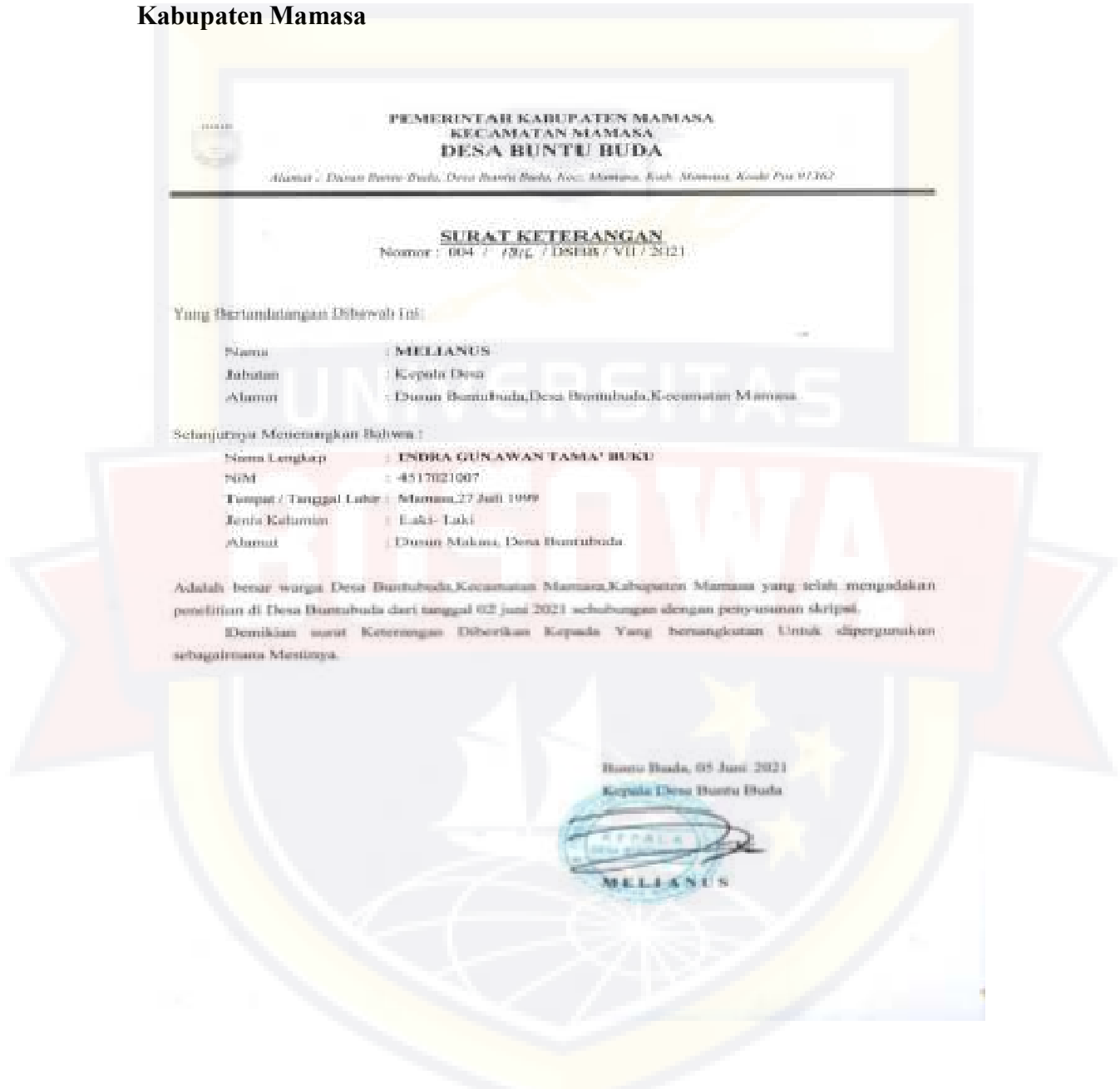
**Gambar 1. 13** Yansen P S.T selaku masyarakat di Dusun Randanan dan informan penelitian pada saat sedang melaksanakan proses wawancara kepada informan yang dilaksanakan pada hari Rabu 30 Juni 2021 bertempat di Rumah informan untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.



**Gambar 1. 14** Imanuel Tato Podo selaku masyarakat di Dusun Kampung Baru dan informan penelitian pada saat sedang melaksanakan proses wawancara kepada informan yang dilaksanakan pada hari Rabu 30 Juni 2021 bertempat di Rumah informan untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.

## Lampiran III : Surat Pernyataan Pelaksanaan penelitian di Desa Buntu Buda

### Kabupaten Mamasa



**Gambar 1. 15** Surat pernyataan pelaksanaan penelitian











































